

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERKEMBANGAN DESA DAN STRATEGI MENUJU DESA MANDIRI

**(Studi : Desa Ngofakiaha, Kec. Malifut
Kab. Halmahera Utara)**

SKRIPSI

Oleh:

M. SAIRI SAHRUN

NIM. 45 12 042 005



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK**

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

2018

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERKEMBANGAN DESA
DAN STRATEGI MENUJU DESA MANDIRI**

**(Studi : Desa Ngofakiaha, Kec. Malifut
Kab. Halmahera Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Teknik (S.T)

UNIVERSITAS

BOSOWA

Oleh:

M. SAIRI SAHRUN

NIM. 45 12 042 005

JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

2018

SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERKEMBANGAN DESA DAN STRATEGI MENUJU DESA MANDIRI

(Studi : Desa Ngofakiaha, Kec. Malifut
Kab. Halmahera Utara)

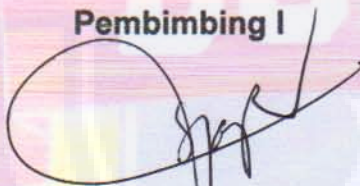
Disusun dan diajukan oleh

M. SAIRI SAHRUN

NIM. 45 12 042 005

Menyetujui :

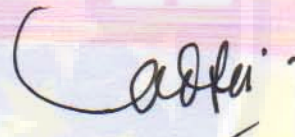
Pembimbing I



Dr. Ir. Syahriar Tatto, M.S

NIDN: 0918026902

Pembimbing II



Ir. Jufriadi, M.SP

NIDN: 0931016802

Mengetahui :

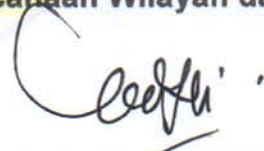
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Bosowa Makassar



Dr. Ridwan, ST., MT

NIDN: 0910127101

Ketua Jurusan
Perencanaan Wilayah dan Kota



Ir. Jufriadi, M.SP

NIDN: 0931016802

HALAMAN PENERIMAAN

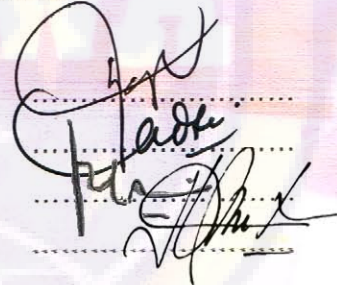
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa, Nomor : A. 349/SK/FT/UNIBOS/IX/2018 pada tanggal 28 September 2018 tentang PANITIA PENGUJI TUGAS AKHIR MAHASIWA JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, maka :

Pada Hari/Tanggal : Kamis / 8 Oktober 2018
Skripsi Atas Nama : M. Sairi Sahrin
Nomor Pokok : 4512 042 005

Telah diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Skripsi Sarjana Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar setelah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana dan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Jenjang Strata (S-1), pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar.


TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Ketua : Dr. Ir. Syahriar Tatto M.S
Sekertaris : Ir. Jufriadi, M.SP
Anggota : Ir. Hj. Rahmawati Rachman, M.Si
: Ilham Yahya, ST, M.SP



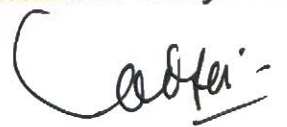
Mengetahui,

Ketua
Fakultas Teknik



Dr. Ridwan, ST, MT
NIDN: 0910127101

Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah Dan Kota



Ir. Jufriadi, M.SP
NIDN: 0931016802

RIWAYAT HIDUP



Nama : M. Sairi Sahrin
Tempat, Tanggal Lahir : Malifut 8 Februari 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Jln. H. Adam Malik Kel/des Ngofakiaha RT 01, RW 01,
Kec. Malifut Kab. Halmahera Utara, Provinsi Maluku
Utara.
Ayah : Sahrin H.M Saleh
Ibu : Helmi Ishak
No. Telp/Hp : (+62) 823 4982 8298
E-mail : muhaiminsahrin@yahoo.com

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Inpres 1 Ngofakiaha : Tahun Lulus 2006
2. SMP Negeri 1 Malifut : Tahun Lulus 2009
3. SMK Negeri 1 Jailolo Timur : Tahun Lulus 2012
4. S1 Universitas Bososwa Makassar
Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota : Tahun Lulus 2018

ABSTRAK

M. Sairi Sahrin, 2018. Analisis Faktor-faktor Perkembangan Desa dan Strategi Menuju Desa Mandiri (Studi : Desa Ngofakiaha, Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara (dibimbing oleh Syahriar Tatto dan Jufriadi).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab perkembangan Desa Ngofakiaha dan merumuskan strategi Desa Ngofakiaha menuju desa mandiri di Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis data mengingat data penulisan ini tidak berupa hasil tetapi proses maka analisis yang digunakan adalah analisis data non statistik yang disebut juga sebagai analisis kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan model matematik, model statistik dan ekonometrik atau model tertentu lainnya. Analisis data dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya seperti pada pengecekan data dan tabulasi, dalam hal ini sekedar membaca tabel-tabel, grafik-grafik atau angka-angka yang tersedia kemudian melakukan uraian dan penafsiran.

Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan Desa Ngofakiaha termasuk desa berkembang berdasarkan Indeks Desa Membangun antara lain Indeks Ketahanan Sosial (IKS) sudah terpenuhi dengan baik yaitu 0,7890, Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) juga sudah baik yaitu 0,6835 akan tetapi Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) belum terpenuhi dengan baik yaitu 0,5333. Sedangkan secara keseluruhan status IDM Desa Ngofakiaha pada tahun 2017 adalah Desa Berkembang dengan nilai 0,6686. Strategi Desa Ngofakiaha menuju Desa Mandiri adalah mempermudah birokrasi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun, memperkuat SDM perangkat desa melalui pelatihan dan pembinaan serta mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan, melakukan musyawarah desa yang mengikutsertakan di dalamnya tokoh masyarakat, dan tokoh agama serta menentukan usaha-usaha yang produktif di Desa Ngofakiaha.

Kata kunci : *Strategi, Indeks Desa Membangun, Desa Mandiri.*

KATA PENGANTAR

Assalamu' Alaikum Wr. Wb

Terima kasih Allah SWT, yang memberikan kehidupan ini, karena Rahmat dan Hidayah-Nya, Skripsi ini dapat terselesaikan dengan Judul “ **Analisis Faktor-faktor perkembangan dan Strategi menuju Desa Mandiri (Studi : Desa Ngofakiaha, Kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara)**”. Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) di Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar.

Penulis sadar akan kemampuan dan usaha, ini namun sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa serta keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dari tugas akhir ini.

Oleh karenanya, dengan rasa tulus dan ikhlas, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Hamsina, ST, M.Si, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar.
2. Bapak Dr. Ir. Syahriar Tatto, MS. Selaku Pembimbing I, dan Ir. Jufriadi, MSP Selaku pembimbing II. Yang sudah menyumbangkan waktu, tenaga dan pikiran serta kesabaran dalam memberikan bimbingan kepada penulis sejak awal penulisan Skripsi ini hingga selesai.
3. Bapak Ir. Jufriadi, MSP, selaku Ketua Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota pada Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak dan Ibu Staf pengajar serta karyawan (i) jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bosowa Makassar, terima kasih atas segala bimbingan, didikan dan bantuan selama

penulis menuntut ilmu di bangku perkuliahan sejak awal hingga sekarang.

5. Pihak instansi pemerintah Desa Ngofakiaha Kabupaten Halmahera Utara yang telah memberikan bantuan selama proses penelitian hingga penyusunan Skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan Rahmat-Nya kepada anda semua yang sudah membantu dalam menyelesaikan Tuga Akhir ini, Amien.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Makassar, Agustus 2018

M. Sairi Sahrin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Tentang Desa	12
B. Klasifikasi dan Status Desa..	23
C. Metode Penyusunan Indeks Desa Membangun (IDM)..	26
D. Membangun Desa Dan Desa Membangun.....	28
E. Tinjauan Tentang Strategi	32
F. Strategi Desa Mandiri Menurut Kementerian Desa.....	34

G. Penelitian Terdahulu	40
H. Kerangka Pikir	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Jenis dan Sumber Data.....	47
D. Metode Sampel Penelitian.. ..	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Teknik Pengolahan Data.....	52
G. Metode Analisis.....	53
H. Teknik Keabsahan Data	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Halamahera Utara.....	56
1. Aspek Fisik Dasar.....	56
2. Aspek Kependudukan.....	63
B. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Malifut.....	65
C. Tinjauan Wilayah Penelitian.....	73
1. Sejarah Desa Ngofakiaha.....	73
2. Letak Geografis.....	74
3. Topografi dan Jenis Tanah.....	77
4. Iklim.....	77
5. Sistem Usaha Tani.....	77
6. Kependudukan.....	79

7. Tingkat Pendidikan.....	82
8. Keadaan Sosial Ekonomi.	83
9. Kondisi Pemerintah Desa.....	84
10. Keadaan Sarana dan Prasarana.....	86
11. Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Ngofakiaha.....	91
D. Analisis Indikator Indeks Desa Membangun (IDM).....	91
1. Analisis Indeks Ketahanan Sosial (IKS).	92
2. Analisis Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE).	92
3. Analisis Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).	93
E. Strategi Menuju Desa Mandiri	83
1. Identifikasi Potensi dan Hambatan	93
2. Langkah Strategis	94
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan.	96
B. Saran.	97
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

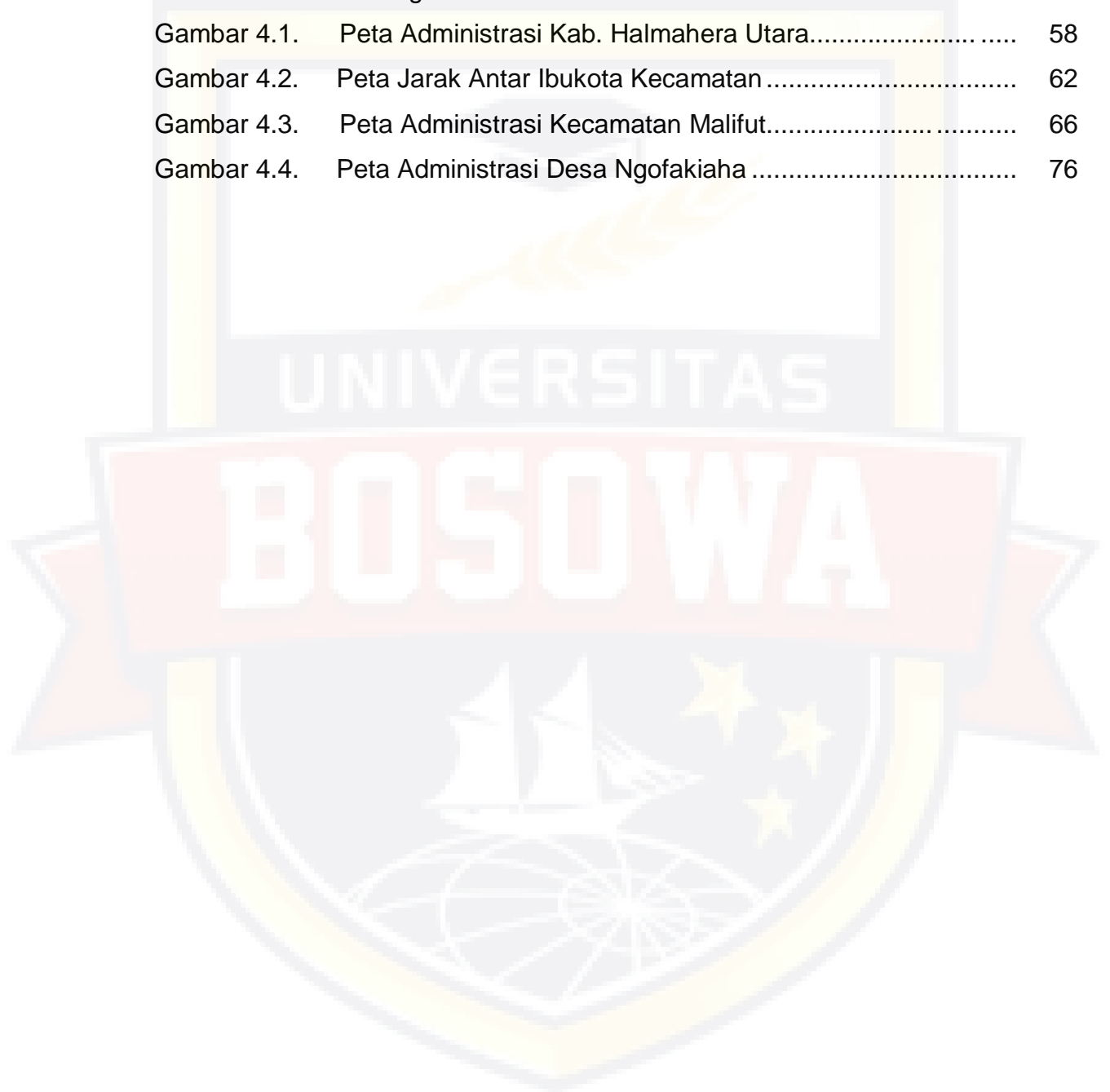
Tabel 2.1	Klasifikasi Desa Berdasarkan IDM.....	28
Tabel 3.1	Informan Penelitian.....	48
Tabel 4.1	Tabel Jarak antara Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan-kecamatan.....	60
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Kab. Halmahera Utara, 2017.....	63
Tabel 4.3	Distribusi dan kepadatan penduduk di Kab. Halmahera Utara tahun 2017.....	64
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan jenis kelamin di Kec. Malifut Tahun 2017.....	68
Tabel 4.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku/Etnis Tahun 2017.....	69
Tabel 4.6	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Di Kec. Malifut Tahun 2017.....	71
Tabel 4.7	Jumlah Rumah Tangga di Kecamatan Malifut Tahun 2017.....	72
Tabel 4.8	Nama-nama Kepala Desa Ngofakiaha yang pernah Menjabat hingga Sekarang.....	74
Tabel 4.9	Jumlah Klasifikasi Penduduk Menurut Kel. Umur dan Jenis Kelamin 2017.....	80
Tabel 4.10	Jumlah jiwa pilih penduduk Desa Ngofakiaha.....	81
Tabel 4.11	Jumlah Jiwa Pemilih Pemula.....	81
Tabel 4.12	Jumlah Penduduk Dewasa Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2017.....	82

Tabel 4.13	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Tahun 2017.....	83
Tabel 4.14	Jumlah Ternak di Desa Ngofakiaha Tahun 2017.....	84
Tabel 4.15	Kelembagaan Pemerintah Desa Ngofakiaha.....	85
Tabel 4.16	Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa Ngofakiaha.....	86
Tabel 4.17	Kelembagaan Kemasyarakatan Desa Ngofakiaha.....	86
Tabel 4.18	Sarana dan Prasarana di Desa Ngofakiaha 2017.....	87
Tabel 4.19	Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Ngofakiaha tahun 2017.....	91

UNIVERSITAS
BOSOWA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Kerangka Pikir	44
Gambar 4.1.	Peta Administrasi Kab. Halmahera Utara.....	58
Gambar 4.2.	Peta Jarak Antar Ibukota Kecamatan	62
Gambar 4.3.	Peta Administrasi Kecamatan Malifut.....	66
Gambar 4.4.	Peta Administrasi Desa Ngofakiaha	76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang di dalamnya merupakan kesatuan hukum yang memiliki organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat, dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (otonomi) dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut Adisasmita (2006 : 1) Sekitar 65% jumlah penduduk hidup di daerah perdesaan, sisanya sekitar 35% jumlah penduduk menetap di daerah perkotaan.

Beberapa metode dan pendekatan telah dikembangkan untuk memahami masalah dan membantu merumuskan kebijakan guna memecahkan masalah pembangunan perdesaan. Sejak tahun 1970an para pakar banyak yang memanfaatkan metode, pendekatan, dan logika berfikir survei verifikatif dalam meriset masalah sosial masyarakat perdesaan. Jumlah desa saat ini mencapai 74.749 desa (Kemendagri, 2015), dan jumlah itu akan terus bertambah sejalan dengan aspirasi masyarakat desa.

Daerah perdesaan sangat luas wilayahnya, mayoritas penduduk desa bekerja di sektor pertanian (pertanian, peternakan, perikanan), struktur perekonomiannya sangat besar pada sektor

pertanian atau merupakan daerah yang berbasis agraris. Kemiskinan dan ketertinggalan sangat dominan pada masyarakat desa, dibandingkan dengan masyarakat kota. Sektor modern yang sangat besar sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi selalu mendapat kesempatan yang sangat luas, sehingga membawa kecenderungan melupakan potensi perdesaan (sektor tradisional).

Secara khusus perlu diberikan perhatian kepada masyarakat perdesaan khususnya masalah-masalah yang menghambat proses pergerakan dan perubahan masyarakat perdesaan sehingga mereka dapat ikut serta dalam pembangunan nasional. Timbulnya perubahan-perubahan dengan variasivariasi pendekatan terhadap pembangunan perdesaan, sebagai usaha untuk menyentuh dan memperbaiki taraf hidup kelompok masyarakat miskin disebabkan oleh kompleksnya dan sukarnya mengatasi keterbelakangan perdesaan.

Kesukaran tersebut tidak hanya bersumber dari faktor-faktor yang sifatnya ekonomis mikro, seperti kekurangan modal, teknologi yang kurang memadai, sarana dan prasarana yang minim, tetapi juga hambatan-hambatan yang bersumber dari dimensi struktur masyarakat perdesaan, seperti susunan kekuasaan dan pola-pola kelembagaan tradisional. Untuk meningkatkan pembangunan di desa berbagai program pembangunan telah dilakukan, perencanaan dan implementasinya ternyata masih belum memberikan hasil yang

optimal. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat dan arah perkembangan desa adalah faktor lokasi, atau letak desa terhadap pusat-pusat fasilitas dan jalan perhubungan (lancar atau tidak lancar).

Lokasi mengandung arti jarak suatu tempat (desa) dengan tempat lain yang berfungsi sebagai pusat dan dipengaruhi oleh kondisi prasarana perhubungan yang akan memberi pengaruh terhadap lancar atau tidaknya komunikasi sehingga mempengaruhi tingkat perkembangan desa. Jarak desa terhadap ibu kota propinsi, kota kabupaten, kota kecamatan, kondisi jalan (perhubungan), kelas jalan, frekuensi jalan (kecepatan perhubungan) merupakan faktor-faktor penyebab adanya desa terisolir/desa terpencil. Desa yang terpencil dalam arti kehilangan hubungan terhadap perubahan-perubahan dari luar dapat menyebabkan lambatnya proses perkembangan masyarakat desa. Dalam perkembangan setiap desa untuk sampai pada klasifikasi tingkat perkembangan desa, diukur atau dinilai berdasarkan indikator-indikator tertentu yang ada pada setiap desa tersebut. Indikator tersebut antara lain keseimbangan kekuatan unsur-unsur dari dalam desa itu sendiri serta intensitas pengaruh unsur luar, yang ditentukan oleh posisi desa terhadap pusat unit wilayah yang lebih besar dan pusat fasilitas.

Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar

dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.

Untuk mendukung upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan, yakni mengentaskan 5000 Desa Tertinggal dan meningkatkan sedikitnya 2000 Desa Mandiri sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019, diperlukan kejelasan status kemajuan dan kemandirian desa di seluruh Indonesia. Seperti yang sudah dinyatakan secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa), bahwa tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Dengan demikian, tindakan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus diabdikan pada pencapaian tujuan pembangunan desa itu.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dalam Peraturan Menteri Desa No 2 Tahun 2016, status kemajuan dan kemandirian desa dijelaskan dengan klasifikasi yang diharapkan dapat memfasilitasi pemahaman tentang situasi dan kondisi desa saat ini, serta bagaimana langkah kebijakan yang harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan kehidupan desa menjadi lebih maju dan

mandiri. Cara klasifikasi tersebut tentu harus peka terhadap karakteristik desa yang senyatanya sangat beragam, bukan hanya dari segi fisik geografis tetapi juga terkait nilai-nilai, budaya dan tingkat prakarsa masyarakat desa. Penyusunan Indeks Desa Membangun menyediakan ukuran yang mampu melihat posisi dan status desa serta arah tingkat kemajuan dan kemandirian desa. Indeks Desa.

Membangun (IDM) dimaksudkan antara lain untuk (a) menjadi instrumen dalam menempatkan status/posisi desa dan menilai tingkat kemajuan dan kemandirian desa; (b) menjadi bahan penyusunan target lokasi (lokus) berbasis desa, (c) menjadi instrumen koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Desa, serta lembaga lain. Melalui Indeks Desa Membangun status kemajuan dan kemandirian desa tergambar dengan status Desa Mandiri (atau bisa disebut sebagai Desa Sembada), Desa Maju (atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Sembada), Desa Berkembang (atau bisa disebut sebagai Desa Madya), Desa Tertinggal (atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Madya) dan Desa Sangat Tertinggal (atau bisa disebut sebagai Desa Pratama).

Salah satu poin yang paling penting dalam pembahasan Peraturan Menteri Desa No 2 Tahun 2016 adalah terkait indeks desa membangun. Namun dalam penerapannya ada saja hal yang menjadi hambatan desa dalam menuju desa mandiri seperti sumber daya

alam, letak geografis, dan sebagainya. Selain itu tingkat kesiapan tata kelola yang masih rendah dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang ada di desa, juga dapat menghambat tujuan desa menjadi desa mandiri. Salah satu kendala yang mendominasi adalah tempat yang sulit dijangkau sehingga proses pembangunan terhambat. Hal inilah yang menjadi penyebab utama kesenjangan pembangunan. Berbagai program percepatan yang diharapkan menjadi katalis terhadap peningkatan kegiatan pembangunan nyatanya masih dirasa kurang dampaknya.

Menurut Kurniawan (2015) dalam buku *Desa Mandiri, Desa Membangun* yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Bahwa ada beberapa syarat desa mandiri. Pertama, melakukan pendayagunaan sumber daya yang ada di desa. Kedua, menjalankan penataan serta pembangunan asset dalam desa. Ketiga, aktif dalam kelembagaan masyarakat maupun di lingkungan masyarakat. Keempat, tersedianya anggaran (*budget*) desa guna mengelolah berbagai kegiatan baik pemberdayaan maupun pembangunan. Kelima, terdapat kerja sama antar desa dengan pihak lainnya serta terdapat pendampingan dalam desa yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat desa dan mempunyai kemampuan (*force*) pada ketahanan sosial (IKS), ketahanan ekonomi (IKE), dan ketahanan lingkungan (IKL).

Pada umumnya aspek sumberdaya manusia di perdesaan mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif rendah serta pengelolaan potensi yang belum berkembang. Hal ini lah yang terjadi di Desa Ngofakiaha Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara. Desa Ngofakiaha merupakan salah satu desa di Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara merupakan desa dengan masyarakat tingkat ekonomi menengah ke bawah yang sebagian besar mata pencahariannya di bidang perkebunan, peternakan, perikanan, dan wisata alam, (*Sumber : Data Monografi Desa Ngofakiaha 2017*).

Pada tahun 2016 Desa Ngofakiaha masih tergolong dalam tingkatan desa swadaya (tertinggal) yaitu desa yang belum mampu berdiri dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri, dan urusan administrasi belum terselenggara dengan baik. Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 030 Tahun 2016 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa, diketahui bahwa Desa Ngofakiaha termasuk desa tertinggal.

Berdasarkan data Laboratorium Desa Universitas Sultan Hairun Ternate tahun 2017, Desa Ngofakiaha saat ini sudah meningkat statusnya menjadi desa berkembang (desa madya). Desa berkembang, atau bisa disebut sebagai desa madya adalah desa potensial menjadi desa maju yang memiliki potensi sumber daya

sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

Desa Ngofakiaha sebenarnya mempunyai banyak potensi yang menjanjikan untuk menjadi desa mandiri, salah satunya di Desa Ngofakiaha terdapat peternakan Sapi Bali sehingga Desa Ngofakiaha dikenal juga sebagai daerah pengembang peternakan Sapi Bali di Maluku Utara. Dalam bidang perikanan, Desa Ngofakiaha merupakan produksi ikan air tawar seperti Gurame dan Nila. Selain peternakan dan perikanan, perkebunan di Ngofakiaha juga memiliki potensi untuk menjadi desa agrowisata yaitu perkebunan durian dan cengkeh. Dari sektor home industri, terdapat juga potensi yang berasal dari usaha kecil menengah seperti keripik pisang, talas, dan singkong.

Desa Ngofakiaha sekilas sudah cukup maju dilihat dari keadaan rumah-rumah warga, dan keadaan desa secara umum. Dengan segala potensi yang dimiliki serta keadaan desa yang terlihat sudah cukup baik, nyatanya Desa Ngofakiaha masih termasuk desa berkembang. Hal ini dikarenakan Desa Ngofakiaha belum memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis menganggap perlu diadakannya penelitian mengenai perkembangan Desa Ngofakiaha dan strategi menuju desa mandiri. Pemilihan Desa Ngofakiaha sebagai tempat penelitian disebabkan keadaan Desa Ngofakiaha yang sudah berkembang.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas maka rumusan masalah yang ada adalah :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan Desa Ngofakiaha berkembang ?
2. Bagaimanakah strategi Desa Ngofakiaha untuk menuju desa mandiri ?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab perkembangan Desa Ngofakiaha.
2. Untuk merumuskan strategi Desa Ngofakiaha menuju desa mandiri.

D. Manfaat Penelitian.

1. Secara Praktis.

Bagi instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran, masukan-masukan bagi aparaturnya Pemerintahan Desa khususnya Kepala Desa Ngofakiaha Kecamatan

Malifut Kabupaten Halmahera Utara dalam membuat program desa menuju desa mandiri.

2. Secara Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi, dan pengetahuan dalam khasanah Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota khususnya yang berkaitan dengan konsep perkembangan desa dan strategi menuju desa mandiri.

E. Ruang Lingkup Penelitian.

1. Ruang Lingkup Wilayah.

Yang menjadi ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah Desa Ngofakiaha yang berada di dalam wilayah Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara.

2. Ruang Lingkup Materi.

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini dibatasi pada kajian tentang faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan Desa Ngofakiaha, baik secara fisik maupun non fisik (kebijakan dan fenomena). Kemudian merumuskan strategi menuju desa mandiri dengan segala potensi yang dimiliki serta faktor-faktor pendukung lainnya.

F. Sistematika Penulisan.

Untuk lebih memudahkan penulisan ini secara sistematis, maka diuraikan dalam bentuk sistematika penulisan yang secara garis

besar menguraikan bab dan sub bab dalam penulisan Skripsi ini, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Pada bagian ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini menguraikan Tinjauan Tentang Desa, Klasifikasi Dan Status Desa, Metode Penyusunan Indeks Desa Membangun (IDM), Membangun Desa Dan Desa Membangun, Tinjauan Tentang Strategi, Strategi Desa Mandiri Menurut Kementerian Desa, Penelitian Yang Relevan dan Kerangka Pikir.

BAB III METODE PENELITIAN, Pada bagian ini diuraikan tentang Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Variabel Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data dan Definisi Operasional.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, Pada bagian ini akan diuraikan mengenai Gambaran Umum Kabupaten Halmahera Utara, Gambaran Umum Kecamatan Malifut, Gambaran Tentang Desa Ngofakiaha, Tinjauan Rencana Tata Ruang Kabupaten Halmahera Utara, serta Hasil Analisis Penelitian.

BAB V PENUTUP, Pada bagian ini menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran/Rekomendasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Desa.

1. Pengertian Desa.

Desa menurut Widjaja (2003: 3) adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013: 2) desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Selanjutnya menurut Pasal 1 Bab I UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan bahwa: "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Ndraha (1981: 30) Dilihat dari sudut formal, desa-desa dewasa ini dapat digolongkan atas dua tipe, yaitu :

- a. Desa yang terdiri dari hanya satu dusun saja.
- b. Desa yang meliputi lebih dari satu dusun.

Desa yang disebut pertama terjadi melalui dua kemungkinan :

- a. Akibat pemecahan desa.
- b. Memang demikian turun-temurun.

Desa yang disebut kedua terbentuk juga melalui kemungkinan-kemungkinan :

- a. Akibat penggabungan beberapa desa kecil menjadi desa baru.
- b. Memang demikian turun-temurun.

Menurut Ndraha (1981:20) Unsur-unsur Desa ialah komponen-komponen pembentuk desa sebagai satuan ketatanegaraan. Komponen-komponen tersebut ialah :

- a. Wilayah desa
- b. Penduduk atau masyarakat Desa
- c. Pemerintahan Desa.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, peneliti memberikan kesimpulan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Desa.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf profesional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku profesional dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan; Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Nurcholis (2011: 77) Badan Permusyawaratan Desa (BPD), BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dari uraian

di atas peneliti memberikan kesimpulan bahwa pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan staf. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf profesional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku profesional dalam menjalankan tugasnya.

3. Keuangan Desa.

Keuangan desa dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan desa dalam

satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang outputnya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDesa. Dalam APBDesa inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam tahun berjalan.

Dari uraian di atas peneliti memberikan kesimpulan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut yang berasal dari pendapatan asli daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

4. Pembangunan Desa.

Menurut Amanulloh, dkk (2016 : 34) dalam buku yang berjudul Modul Pelatihan Praturgas Pendamping Desa Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Teknokratisme pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa berdiri di atas tiga matra. Pertama, Jaring Komunitas Wiradesa (Jamu Desa). Matra

ini diarahkan untuk mengarusutamakan penguatan kapabilitas manusia sebagai inti pembangunan desa sehingga mereka menjadi subyek berdaulat atas pilihan-pilihan yang diambil. Kedua, Lumbung Ekonomi Desa (Bumi Desa). Matra ini mendorong muncul dan berkembangnya geliat ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemilik dan partisipan gerakan ekonomi di desa. Ketiga, Lingkar Budaya Desa (Karya Desa). Matra ini mempromosikan pembangunan yang meletakkan partisipasi warga dan komunitas sebagai akar gerakan sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain.

a. Jaring Komunitas Wiradesa (Jamu Desa).

Matra ini bertujuan untuk memperkuat kualitas manusia dengan memperbanyak kesempatan dan pilihan dalam upayanya menegakkan hak dan martabat. Memajukan kesejahteraan, baik sebagai individu, keluarga maupun kolektif warga desa. Masalah yang dihadapi saat ini adalah perampasan daya manusia warga desa itu yang ternyata pada situasi ketidakberdayaan, kemiskinan dan bahkan marjinalisasi. Fakta ketidakberdayaan itu kini telah berkembang menjadi sebab, aspek dan sekaligus dampak yang menghalangi manusia warga desa hidup bermartabat dan sejahtera.

Kemiskinan berkembang dalam sifatnya yang multidimensi dan cenderung melanggar hak asasi. Situasi ini diperburuk dengan dengan adanya ketiadaan akses terhadap kebutuhan dasar seperti

pendidikan, kesehatan, maupun informasi. Sehingga kehidupan masyarakat miskin di perdesaan dirasa semakin marjinal. Di sini, matra Jaring Komunitas Wiradesa menjadi dasar dilakukannya tindakan yang mampu mendorong ekspansi kapabilitas dengan memperkuat daya pada berbagai aspek kehidupan manusia warga desa yang menjangkau aspek nilai dan moral, serta pengetahuan lokal desa.

Penguatan kapabilitas dilakukan dalam rangka peningkatan stok pengetahuan masyarakat desa, baik melalui pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan diluar sekolah (non formal). Melalui penciptaan komunitas belajar dan balai-balai rakyat sebagai media pencerahan dengan basis karakteristik sosial dan budaya setempat. Tidak hanya sekedar menambah pengetahuan dan keterampilan, peningkatan kapabilitas masyarakat desa merupakan modal penting dari tegaknya harkat dan martabat masyarakat serta kemampuan masyarakat untuk mengontrol jalannya kegiatan ekonomi dan politik.

b. Lumbung Ekonomi Desa (Bumi Desa).

Matra kedua dari pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa ini merupakan suatu ihtiar untuk mengoptimisasikan sumberdaya di desa dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Konsep Lumbung Ekonomi Desa merupakan pengejawantahan

amanat konstitusi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 33 UUD1945, yaitu untuk melakukan pengorganisasian kegiatan ekonomi berdasar atas asas kekeluargaan, penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta penggunaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Lumbung Ekonomi Desa diarahkan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan energi dan kemandirian ekonomi desa. Sebagai basis kegiatan pertanian dan perikanan, desa diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan di wilayahnya sendiri dan di wilayah lain, tanpa melupakan penumbuhan aktivitas ekonomi produktif di sektor hilir. Optimalisasi sumberdaya desa juga mesti tercermin dalam kesanggupan desa memenuhi kebutuhan energi yang juga merupakan kebutuhan pokok masyarakat desa. Kemandirian ekonomi desa tercermin dari berjalannya aktivitas ekonomi yang dinamis dan menghasilkan penciptaan lapangan kerja secara berkelanjutan di perdesaan. Termasuk mendorong kemampuan masyarakat desa mengorganisir sumber daya finansial di desa melalui sistem bagi hasil guna mendukung berlangsungnya kegiatan ekonomi yang berkeadilan.

Aktor utama Lumbung Ekonomi Desa dititikberatkan pada komunitas, tanpa mengesampingkan peran individu sebagai aktor

penting kegiatan ekonomi desa. Hal ini berarti bahwa kegiatan ekonomi di desa utamanya mesti dijalankan secara kolektif berdasarkan prinsip gotong royong yang menjadi ciri khas sosio-kultural masyarakat Indonesia pada umumnya, dan masyarakat desa pada khususnya.

Dari aspek ini, organisasi ekonomi di desa berperan penting dalam memikul beban untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di desa yang memiliki semangat kolektivitas, pemerataan, dan solidaritas sosial. Organisasi ekonomi itu dapat berupa koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), lembaga keuangan mikro, usaha bersama, atau yang lainnya. Selain itu dan tidak kalah pentingnya, lembaga-lembaga ekonomi ini haruslah memiliki kecakapan dan keterbukaan dalam menjalankan usaha perekonomian di desa.

Dalam konteks pelaksanaan UU Desa misalnya, pembentukan BUMDesa yang kuat mensyaratkan pengelolaan oleh orang-orang desa yang teruji secara nilai dan moral, serta memiliki modal sosial yang kuat, serta mampu mengembangkan kreasi dan daya untuk menjangkau modal, jaringan dan informasi. Pokok soal yang utama adalah membekali masyarakat dengan aset produktif yang memadai sehingga akses terhadap sumber daya ekonomi menjadi lebih besar. Sumber daya ekonomi harus sedapat mungkin ditahan di desa dan hanya keluar melalui proses penciptaan nilai

tambah. Disinilah letak pentingnya intervensi inovasi dan adopsi teknologi serta dukungan sarana dan prasarana agar proses penciptaan nilai tambah dari kegiatan ekonomi di desa berjalan secara baik.

Paradigma lama yang menempatkan desa sebagai pusat eksploitasi sumberdaya alam dan tenaga kerja tidak terampil (*unskill labour*) telah menyebabkan terus meluasnya persoalan bangsa, mulai dari tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, tersingkirnya pengetahuan dan kearifan lokal warga, terabaikannya peran strategis perempuan, rendahnya daya saing, hingga meluasnya kerusakan lingkungan.

Desa harus menjadi sentra inovasi, baik secara sosial, ekonomi, dan teknologi. Inovasi secara sosial dimaksudkan untuk meningkatkan soliditas dan solidaritas antarwarga dengan memegang kuat nilai-nilai dan budaya luhur di masing-masing desa. Inovasi secara sosial ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan daya-lenting warga (*resilience*) dalam menghadapi berbagai tantangan di depan. Inovasi secara ekonomi dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas warga untuk menggeser model ekonomi eksploitatif ke arah ekonomi inovatif yang alat ukur keberhasilannya diantaranya terbukanya lapangan pekerjaan di desa, meningkatnya nilai tambah produk, serta berkurang tekanan terhadap eksploitasi sumberdaya alam secara

berlebihan. Sedangkan inovasi secara teknologi adalah sebuah kesadaran untuk mengembangkan teknologi tepat guna berbasis sumberdaya alam lokal, teknologi lokal, dan sumberdaya manusia lokal.

c. Lingkar Budaya Desa (Karya Desa)

Matra ini merupakan suatu proses pembangunan desa sebagai bagian dari kerja budaya (kolektivisme) yang memiliki semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan bersama dengan pondasi nilai, norma dan spirit yang tertanam di desa. Matra ketiga ini mensyaratkan adanya promosi pembangunan yang meletakkan partisipasi warga dan komunitas sebagai akar gerakan sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain.

Gerakan pembangunan desa tidaklah tergantung pada inisiatif orang perorang, tidak juga tergantung pada insentif material (ekonomi), tetapi lebih dari itu semua adalah soal panggilan kultural. Berdasarkan Lingkar Budaya Desa, gerakan pembangunan desa haruslah dilakukan karena kolektivisme, yang di dalamnya terdapat kebersamaan, persaudaraan, solidaritas, dan kesadaran untuk melakukan perubahan secara bersama.

Dana desa dalam konteks memperkuat pembangunan dan pemberdayaan desa misalnya, harus dipahami agar tidak menjadi bentuk ketergantungan baru. Ketiadaan dana desa tidak boleh dimaknai tidak terjadi pembangunan. Karenanya dana desa

haruslah menghasilkan kemajuan, bukan kemunduran. Pembangunan desa dimaknai sebagai kerja budaya dengan norma dan moral sebagai pondasinya, sebagai *code of conduct*, dan dengan begitu perilaku ekonomi dalam kehidupan desa akan mampu menegakkan martabat dan mensejahterahkan.

Tiga matra pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tersebut di atas memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Komitmen untuk menjalankan program dan kegiatan di dalam lingkungan Ditjen PPMD dengan menggunakan pendekatan (metode) ini, diharapkan dapat melipatgandakan kemampuan mencapai target dan menghasilkan dampak yang bisa dipertahankan (*sustained impact*) untuk kemajuan dan kesejahteraan desa.

B. Klasifikasi Dan Status Desa.

Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni :

(i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. Klasifikasi desa tersebut untuk menunjukkan keragaman karakter setiap desa dalam rentang skor 0,27 - 0,92 Indeks Desa Membangun. Klasifikasi status desa adalah 5 (lima) status kemajuan dan kemandirian desa, yakni dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Desa mandiri atau yang disebut desa sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan
- b. Desa maju atau yang disebut desa pra-sembedada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
- c. Desa berkembang atau yang disebut desa madya adalah desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
- d. Desa tertinggal atau yang disebut desa pra-madya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

- e. Desa sangat tertinggal atau yang disebut desa pratama adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Klasifikasi dalam 5 status desa tersebut juga untuk menajamkan penetapan status perkembangan desa dan sekaligus rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan. Status desa tertinggal, misalnya, dijelaskan dalam dua status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dimana situasi dan kondisi setiap desa yang ada di dalamnya membutuhkan pendekatan dan intervensi kebijakan yang berbeda. Menangani desa sangat tertinggal akan berbeda tingkat afirmasi kebijakannya di banding dengan desa tertinggal, dengan nilai rata-rata nasional Indeks Desa Membangun 0,566 klasifikasi status desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

- a. Desa Sangat Tertinggal : $< 0,491$
- b. Desa Tertinggal : $> 0,491$ dan $< 0,599$
- c. Desa Berkembang : $> 0,599$ dan $< 0,707$
- d. Desa Maju : $> 0,707$ dan $< 0,815$
- e. Desa Mandiri : $> 0,815$

Desa berkembang terkait dengan situasi dan kondisi dalam status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dapat dijelaskan dengan faktor kerentanan. Apabila ada tekanan faktor kerentanan, seperti terjadinya guncangan ekonomi, bencana alam, ataupun konflik sosial maka akan membuat status desa berkembang jatuh turun menjadi desa tertinggal, dan biasanya, jika faktor bencana alam tanpa penanganan yang cepat dan tepat, atau terjadinya konflik sosial terus terjadi berkepanjangan maka sangat potensial berdampak menjadikan desa tertinggal turun menjadi desa sangat tertinggal. Sementara itu, kemampuan desa berkembang mengelola daya, terutama terkait dengan potensi, informasi/nilai, inovasi/prakarsa, dan kewirausahaan akan mendukung gerak kemajuan desa berkembang menjadi desa maju.

Klasifikasi status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun ini juga diarahkan untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan pemajuan desa menuju desa mandiri. Desa berkembang, dan terutama desa maju, kemampuan mengelola daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan akan membawanya menjadi desa mandiri.

C. Metode Penyusunan Indeks Desa Membangun (IDM).

Indeks Desa Membangun (IDM) disusun dengan memperhatikan ketersediaan data yang bersumber dari Potensi Desa (Podes), yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. IDM merupakan

indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial, ekonomi dan budaya. Ketiga dimensi terdiri dari variabel, dan setiap variabel diturunkan menjadi indikator operasional. Prosedur untuk menghasilkan Indeks Desa Membangun adalah sebagai berikut:

1. Setiap indikator memiliki skor antara 0 s.d. 5; semakin tinggi skor mencerminkan tingkat keberartian. Misalnya : skor untuk indikator akses terhadap pendidikan sekolah dasar; bila Desa A memiliki akses fisik ≤ 3 Km, maka Desa A memiliki skor 5, dan Desa B memiliki akses fisik > 10 Km, maka memiliki skor 1. Ini berarti penduduk Desa A memiliki akses yang lebih baik dibandingkan dengan penduduk Desa B.

2. Setiap skor indikator dikelompokkan ke dalam variabel, sehingga menghasilkan skor variabel. Misalnya variabel kesehatan terdiri dari indikator :

- a. waktu tempuh ke pelayanan kesehatan < 30 menit,
- b. ketersediaan tenaga kesehatan dokter, bidan dan nakes lain,
- c. akses ke poskesdes, polindes dan posyandu,
- d. tingkat aktifitas posyandu dan
- e. kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).

Total skor variabel selanjutnya dirumuskan menjadi indeks :

Indeks Variabel : Σ Indikator X Nilai Maksimum (X)

3. Indeks dari setiap variabel menjadi Indeks Komposit yang disebut dengan Indeks Desa Membangun (IDM).

$$IDM = 1/3 (IKS + IKE + IKL)$$

IDM : Indeks Desa Membangun

IKS : Indeks Ketahanan Sosial

IKE : Indeks Ketahanan Ekonomi

IKL : Indeks Ketahanan Lingkungan (Ekologi)

4. Untuk menetapkan status setiap desa dilakukan klasifikasi dengan menghitung range yang diperoleh dari nilai maksimum dan minimum. Nilai range yang diperoleh menjadi pembatas status setiap desa, sehingga ditetapkan lima klasifikasi status desa :
Tabel 2 berikut ini berupaya menyajikan klasifikasi desa berdasarkan indeks desa membangun (IDM).

Tabel 2.1 Klasifikasi Desa Berdasarkan IDM

No.	Status Desa	Nilai Batas
1	Sangat Tertinggal	$\leq 0,491$
2	Tertinggal	$> 0,491$ Dan $\leq 0,599$
3	Berkembang	$> 0,599$ Dan $\leq 0,707$
4	Maju	$> 0,707$ dan $\leq 0,815$
5	Mandiri	$> 0,815$

Sumber : Indeks Desa Membangun 2015.

D. Membangun Desa Dan Desa Membangun.

Menurut Borni Kurniawan dalam buku Desa Mandiri, Desa Membangun (2015:17) Kata pembangunan menjadi diskursus yang jamak diperbincangkan manakala pemerintahan Orde baru menggalakannya. Bahkan, kata pembangunan menjadi *trade mark*

kabinet pemerintahan di bawah kepemimpinan Soeharto. Pembangunan sebagai diskursus sejatinya berkaitan dengan diskursus *developmentalisme* yang dikembangkan negara-negara barat.

Dilihat secara mendalam, pengertian dasar pembangunan adalah istilah yang dipakai dalam berbagai konteks berbeda. Hanya saja ia lebih sering dipakai dalam konotasi politik dan ideologi tertentu. Ada yang menyetarakan pembangunan dengan perubahan sosial, pertumbuhan, modernisasi dan rekayasa sosial. Dalam konteks pemerintahan Orde Baru, implementasi konsep pembangunan syarat dengan menjadikan desa sebagai obyek pembangunan, bukan subyek. Dalam kerangka ini, maka desa tidak lebih menjadi lokasi bagi pemerintah untuk mengambil dan membelanjakan sumber daya negara.

Hanya saja bukan untuk memenuhi kebutuhan dan kemajuan desa. Pemerintah Orde Baru merubah birokrasi menjadi mesin politik kekuasaan yang minim orientasi pemberdayaan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar yang melekat pada masyarakat lokal. Sumber daya ekonomi lokal dieksploitasi sedemikian rupa hanya sekadar memenuhi target pertumbuhan. Sementara kesejahteraan masyarakat desa sebagai subyek sekaligus pemilik sumber daya terpinggirkan. Akhirnya, kata pembangunan lekat pada tubuh pemerintah sebagai subyek pelaku, sementara desa hanya sebagai

obyek pembangunan yang dilakukan pemerintah. Konsep kunci pembangunan untuk memahami frasa “membangun desa” dan “desa membangun” tidak dikenal dalam wacana dan teori pembangunan.

Konsep pembangunan desa sebenarnya tidak dikenal dalam literatur pembangunan. Secara historis, pembangunan desa merupakan kreasi dan ikon Orde Baru, yang muncul pada Pelita I (1969-1974) yang melahirkan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa di Departemen Dalam Negeri. Namun pada pertengahan 1980-an pembangunan desa kemudian diubah menjadi pembangunan masyarakat desa, sebab pembangunan desa sebelumnya hanya berorientasi pada pembangunan fisik, kurang menyentuh masyarakat.

Direktorat Jenderal Bangdes juga berubah menjadi Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, namun arus pemberdayaan yang hadir pada tahun 1990-an nomenklatur juga berubah menjadi Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang bertahan sampai sekarang. Ditjen ini masih akrab dengan nomenklatur pembangunan desa, karena pembangunan desa tertuang dalam PP No. 72/2005. Baik RPJMN maupun institusi Bappenas dan kementerian lain sama sekali tidak mengenal pembangunan desa, melainkan mengenal pembangunan perdesaan dan pemberdayaan masyarakat (desa).

Pembangunan desa tidak lagi menjadi agenda nasional tetapi dilokalisir menjadi domain dan urusan desa. Literatur teori

pembangunan juga tidak mengenal pembangunan desa. Pembangunan perdesaan (*rural development*) yang lebih banyak dikenal dan dikembangkan. Desa maupun membangun desa menjadi bagian dari pembangunan perdesaan. Bappenas menganut aliran dan posisi ini. Literatur pembangunan perdesaan begitu kaya, dinamis dan transformatif. Terdapat perubahan dari paradigma lama (dekade 1960-an hingga 1980-an) menuju paradigma baru (dekade 1990-an hingga sekarang). Paradigma lama bersifat *state centric: otokratis, top down, sentralistik, hirarkis, sektoral* dan seterusnya. Paradigma baru tampaknya mengandung *spirit rekognisi* dan *subsidiaritas* yang bersifat *society centric : demokratis, bottom up, otonomi, kemandirian, lokalitas, partisipati, emansipatoris* dan seterusnya. Desa membangun adalah spirit Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang Desa menempatkan desa sebagai subyek pembangunan.

Pemerintah supradesa menjadi pihak yang memfasilitasi tumbuh kembangnya kemandirian dan kesejahteraan desa melalui skema kebijakan yang mengutamakan rekognisi dan subsidiaritas. Supra desa tak perlu takut dengan konsekuensi pemberlakuan kedua azas tersebut. Dengan menjadi subyek pembangunan justru desa tidak lagi akan menjadi entitas yang merepotkan tugas pokok pemerintah kabupaten, provinsi bahkan pusat. Justru desa akan menjadi entitas negara yang berpotensi mendekatkan peran negara

dalam membangun kesejahteraan, kemakmuran dan kedaulatan bangsa baik di mata warga negaranya sendiri maupun negara lain.

E. Konsep Analisis (SWOT)

Menurut John A. Pearce dan Richard B. Robinson (2008:200) SWOT adalah akronim dari *strength* (Kekuatan) dan *Weakness* (Kelemahan) internal dari suatu perusahaan serta *opportunities* (Peluang) dan *Threat* (Ancaman) lingkungan yang dihadapinya.. Analisis SWOT merupakan teknik historis yang terkenal dimana pada manager menciptakan gambaran umum secara cepat mengenai situasi strategi yang efektif di turunkan dari “kesesuaian” eksternalnya (Peluang dan Ancaman). Kesesuaian yang baik memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan ancaman. Jika diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini memiliki implikasi yang bagus dan mendalam bagi desain dari strategi yang berhasil.

a. Strength (Kekuatan)

Merupakan sumber daya relatif terhadap pesaing dan kebutuhan dari pasar yang dilayani atau yang akan dilayani suatu perusahaan atau desa. Kekuatan muncul dari sumber daya dan kompetensi yang tersedia bagi perusahaan dan pada sebuah Desa.

b. Weaknes (Kelemahan)

Merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam satu atau lebih sumber daya atau kapabilitas relative suatu perusahaan

dibandingkan pesaingnya, yang menghambat kinerja efektif perusahaan tersebut.

c. Opportunity (peluang)

Merupakan situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan.

d. Threat (ancaman)

Merupakan situasi utama yang tidak menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan.

F. Tinjauan Tentang Strategi.

Kata strategi menurut Bracker dalam Henee, dkk (2010: 53) secara etimologi berasal dari bahasa Yunani klasik, yakni “*strategos*” (Jendral), yang pada dasarnya diambil dari pilihan kata-kata Yunani untuk “pasukan” dan “memimpin”. Strategi merupakan salah satu hal penting karena ia memberikan landasan mencapai suatu tujuan dalam berbagai bentuk. Strategi mempunyai andil besar dalam setiap pengambilan keputusan manajerial. Strategi memberikan pilihan tentang apa yang tidak perlu dilakukan dan apa yang harus dilakukan.

Strategi menurut Nawawi (2012 : 147), dari sudut etimologis berarti penggunaan kata “strategi” dalam manajemen sebuah organisasi, dapat diartikan sebagai kiat, cara dan taktik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi-fungsi

manajemen, yang terarah pada tujuan strategi organisasi. Sedangkan menurut Chandler dalam Akdon (2011 : 12) mengemukakan bahwa strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya. Dengan kata lain, strategi adalah pilihan dan rute yang tidak hanya sekedar mencapai suatu tujuan akan tetapi strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi didalam lingkungan hidup dimana organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya.

Menurut Jauch dan Glueck (1994 : 13) mengemukakan bahwa strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi organisasi dengan tantangan lingkungan dan dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Tetapi strategi bukanlah sekedar rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu. Disatukan artinya strategi mengikat semua bagian organisasi menjadi satu. Strategi itu menyeluruh, artinya strategi meliputi semua aspek yang penting pada suatu organisasi. Sedangkan strategi itu terpadu, artinya semua bagian rencana strategi satu sama lain bersesuaian.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, peneliti memberikan kesimpulan bahwa strategi adalah cara atau metode yang digunakan oleh individu organisasi baik organisasi publik maupun organisasi

swasta dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi yang bersangkutan. Strategi dalam hal ini merupakan bagian terpadu dari suatu rencana (plan), dimana rencana merupakan produk dari perencanaan (planning), yang pada akhirnya perencanaan adalah fungsi dasar dari proses manajemen. Selain itu, strategi dapat dipandang sebagai suatu alat yang dapat menentukan langkah organisasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

F. Strategi Desa Mandiri Menurut Kementerian Desa.

Konsep pembangunan desa ala Orde Baru, strategi pembangunan desa dilakukan dengan memadukan berbagai sektor ke dalam pembangunan desa terpadu, yang berupaya membuat semacam standarisasi tatanan kehidupan desa. Implementasi strategi pembangunan desa ini secara signifikan telah membawa perubahan, terutama dalam mobilitas fisik dan sosial orang desa. Tetapi konsep pembangunan desa semacam ini jelas-jelas tidak bermuara pada transformasi sosial desa. Mengapa tidak membawa transformasi desa? Karena dalam strategi pembangunan desa tersebut, Orde Baru justru tidak memperkuat institusi desa dan otonomi desa, melainkan justru melemahkan, meminggirkan dan bahkan menghancurkan otonomi desa. Eksperimentasi pembangunan desa dengan model yang sama juga masih muncul secara jamak di era reformasi. Pemerintah pusat, melalui Kementerian/Lembaga ramai-ramai

membuat program di desa yang identik dengan sebutan program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

Program-program yang masuk ke desa tersebut bersifat *fragmented* tidak hanya dalam kerangka acuan kerjanya tapi sumber pendanaannya. Sekali lagi, dalam konteks ini, desa hanya sekadar sebagai lokasi bukan arena bagi keikutsertaan sumber daya dan kelembagaan lokal dalam pembangunan. Masing-masing program memiliki *court of conduct*, aturan main dan pelebagaan project berbeda, tapi bermuara pada lokus yang sama yaitu desa sebagai lokasi.

Akibatnya, skema pengelolaan programnya bersifat *intervensionis*. Skema program mengemudikan model pemenuhan kebutuhan prioritas hidup masyarakat, jawaban atas peta persoalan lokal hingga pilihan pengelolaan sumber daya lokal. Secara skematik, posisi program-program seperti ini berada di luar sistem desa, namun memiliki pengaruh *intervensionis* yang kuat.

Tambahan pula, program-program yang tidak mampu menyediakan jawaban yang memadai atas kebutuhan desa seperti menguatnya kapasitas pemerintahan desa, menguatnya partisipasi, emansipasi warga maupun organisasi warga desa, serta kemandirian pengelolaan keuangan desa.

Di satu sisi, menguatnya model “desa membangun” dimana inovasi, partisipasi hingga emansipasi transformasi sosial tumbuh dari bawah dan dalam desa (*endogenous*) adalah bagian dari ketidakterhasilan model pembangunan yang dikemukakan dari luar desa (*exogenous*). Tapi pada sisi yang lain, pembangunan desa yang tumbuh dari dalam menjadi pilar penting pembangunan nasional yang harus direkognisi oleh negara. Bahkan dengan negara merekognisi prakarsa dan emansipasi lokal akan menyatukan seluruh entitas negara bangsa dalam satu konsep dan implementasi pembangunan nasional menuju kemandirian nasional. Jadi, kemandirian negara Indonesia sejatinya terletak pada kemandirian desa-desanya sebagai entitas penyusun dan penyangga nama besar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bangsawan, 2017 : 41).

Menurut Kurniawan (2015: 27) dalam buku *Desa Mandiri, Desa Membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia*. Ada beberapa strategi dari kementerian desa yang secara umum dipraktikkan dalam membangun kemandirian desa dari dalam.

Pertama, membangun kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil di desa yang kritis dan dinamis. Proses pembentukan bangunan warga dan organisasi masyarakat sipil biasanya dipengaruhi oleh faktor eksternal yang mengancam hak publik. Meski demikian, keduanya adalah modal penting bagi desa untuk

membangun kedaulatan dan titik awal terciptanya komunitas warga desa yang nantinya akan menjadi kekuatan penyeimbang atas munculnya kebijakan publik yang tidak responsif masyarakat. Langkah

-langkahnya antara lain:

- a. Melakukan assessment dan pemetaan kapasitas organisasi kemasyarakatan desa. Tujuannya apa ? Pertama, agar pemerintah desa mempunyai data ada berapa, mana dan siapa saja sih organisasi kemasyarakatan desa yang masih aktif dan pasif. Kita mungkin akan bersepakat, bahwa tidak sedikit organisasi kemasyarakatan desa yang masih ada struktur organisasinya tapi sudah tidak ada lagi pengurusnya. Masih ada pengurusnya, ternyata tidak memiliki program dan kegiatan yang jelas. Karena itulah kedua, dengan pemetaan ini diharapkan desa akan memiliki baseline data tentang apa saja masalah dan potensi yang dimiliki organisasi kemasyarakatan desa sehingga memungkinkan menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam menjalankan mandat pembangunan.
- b. Mengorganisasi dan memfasilitasi proses penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan desa melalui penyelenggaraan program/kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas organisasi tersebut.
- c. Hasil pemetaan tersebut sudah seharusnya menjadi landasan bagi pemerintah desa untuk membuat seperangkat strategi kebijakan

dan program desa untuk menguatkan peran organisasi kemasyarakatan desa dalam kerangka pembangunan desa. Caranya bagaimana? Tidak lain pemerintah desa harus mengakomodasi program/kegiatan penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan desa ke dalam dokumen peraturan desa tentang RPJMDesa, RKPDesa dan APBDDesa. Bentuk kegiatan untuk penguatan kapasitas misalnya pelatihan manajemen organisasi, mendorong restrukturisasi/peremajaan pengurus organisasi, ataupun pemberian bantuan desa untuk organisasi kemasyarakatan desa.

- d. Pelibatan organisasi kemasyarakatan desa dalam proses-proses pengambilan kebijakan publik yang diselenggarakan pemerintah desa. Desa tidak hanya terdiri dari pemerintah desa, tapi ada elemen masyarakat yang salah satunya terwakili melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan desa, maka setiap kebijakan strategis desa hendaknya dilandasi atas musyawarah mufakat semua elemen desa. Di samping itu salah satu yang menjamin peran dinamis organisasi masyarakat sipil di desa adalah pelibatan mereka ke dalam arena perumusan dan pengambilan kebijakan desa. Melalui cara ini, secara tidak langsung pemerintah desa telah mengedepankan prinsip penghormatan, partisipasi dan emansipasi warga dalam pembangunan. Dari sinilah nanti akan lahir proses *check and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kedua, memperkuat kapasitas pemerintahan dan interaksi dinamis antara organisasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Ada cukup banyak cerita kemandirian desa yang ditopang oleh kecakapan pemerintahan desa karena proses interaksi yang dinamis dengan organisasi warganya. Apa yang dilakukan sebagaimana bagian dari pembelajaran bagaimana organisasi desa yang diinisiasi masyarakat mampu mendorong lahirnya pemerintahan desa yang responsif atas hak warganya.

Interaksi yang dinamis antara organisasi warga dengan pemerintah desa akan menjadi energi pembaharuan yang memiliki nilai lebih manakala bertemu dengan *local leadership* kepala desa yang berkarakter mau mendengarkan warga dan inovatif-progresif. Menguatnya kapasitas pemerintah desa tentu tidak hanya tercermin pada kemampuan teknokratis aparatur desa membuat perencanaan program/kegiatan pembangunan.

Tercermin pula pada peran BPD membangun proses perumusan dan pengambilan kebijakan yang dinamis. Keterpaduan interaksi yang dinamis antara organisasi warga desa dengan pemerintah desa juga tercermin dalam berbagai inisiatif lokal lainnya. Bukan hanya dalam hal hubungan politik antara BPD dengan pemerintah desa, tapi dalam upaya-upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa seperti air. Salah satu prasyarat menuju desa mandiri dan berdaya adalah adanya pertemuan gerakan

pemberdayaan dari bawah dan dari dalam. Artinya, dari bawah terdapat gerakan masyarakat sipil yang tumbuh dari ikatan kolektif kesadaran publik warga desa. Sedangkan dari dalam berarti ada kemauan dari pemerintah untuk membangun komunikasi politik kebijakan dan melibatkan masyarakat dalam proses-proses pengambilan kebijakan politik pembangunan di desa.

Ketiga, membangun sistem perencanaan dan penganggaran desa yang responsif dan partisipatif. Menuju sebuah desa mandiri dan berdaulat tentu membutuhkan sistem perencanaan yang terarah di ditopang partisipasi warga yang baik. Sebelum Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa lahir, desa telah mengenal sistem perencanaan pembangunan partisipatif. Acuan atau landasan hukumnya waktu itu adalah UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewajiban desa membuat perencanaan pembangunan dipertegas melalui PP No.72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa sebagai regulasi teknis turunan dari UU No.32 Tahun 2004 tersebut.

Keempat, membangun kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan produktif. Saat ini banyak sekali tumbuh inisiatif desa membangun keberdayaan ekonomi lokal. Keberhasilan di bidang ekonomi tersebut tidak lepas dari kemampuan desa membangun perencanaan yang konsisten, partisipatif dan disepakati dalam

dokumen perencanaan dan penganggaran desa (RPJMDesa, RKP Desa dan APB Desa).

G. Penelitian Yang Relevan.

Penelitian tentang perkembangan Desa Ngofakiaha Dan Strategi Menuju Desa Mandiri ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu meski sama-sama meneliti tentang perkembangan desa dan desa mandiri.

Penelitian oleh Agustinus Longa Tiza, dkk (2014) dengan judul Implementasi Program Pembangunan Desa Mandiri Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah) (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara). Perbedaan penelitian Agustinus Longa dkk dengan penelitian ini adalah, proses analisis dan mendeskripsikan realitas Implementasi Program

Pembangunan Desa Mandiri “Anggur Merah” di Kabupaten Timor Tengah Utara, peneliti menggunakan model implementasi yang dikembangkan oleh Edward III (1980) yang lebih dikenal dengan model pendekatan “*Direct and Indirect Impact on Implementataion*”. Sedangkan dalam penelitian ini proses analisis menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) dan strategi desa mandiri menurut Kementerian Desa. Sumber data penelitian Agustinus Longa Tiza, dkk adalah masyarakat desa di Kabupaten Timor Tengah Utara,

sedangkan pada penelitian ini sumber datanya adalah masyarakat Desa Ngofakiaha dan aparaturnya Desa Ngofakiaha Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara.

Penelitian Oleh Almasdi Syahza dan Suarman (2013) dengan judul Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Perdesaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Almasdi Syahza dan Suarman adalah pada penelitian Almasdi dan Suarman, penulis memfokuskan masalah penelitian pada Kendala apa yang dihadapi dalam pengembangan potensi ekonomi di perdesaan; serta bagaimana perumusan model pengembangan daerah tertinggal dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi perdesaan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sedangkan penelitian ini memfokuskan apa saja faktor-faktor penyebab perkembangan Desa Ngofakiaha dan bagaimana strategi desa dalam mewujudkan desa mandiri. Perbedaan selanjutnya adalah, penelitian ini dilakukan di Desa Ngofakiaha Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara sedangkan penelitian Almasdi Syahza dan Suarman dilakukan di daerah Kabupaten Kepulauan Meranti provinsi Riau.

Penelitian oleh Edy Yusuf Agunggunanto, dkk dengan judul Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Perbedaan dengan penelitian ini adalah, penelitian

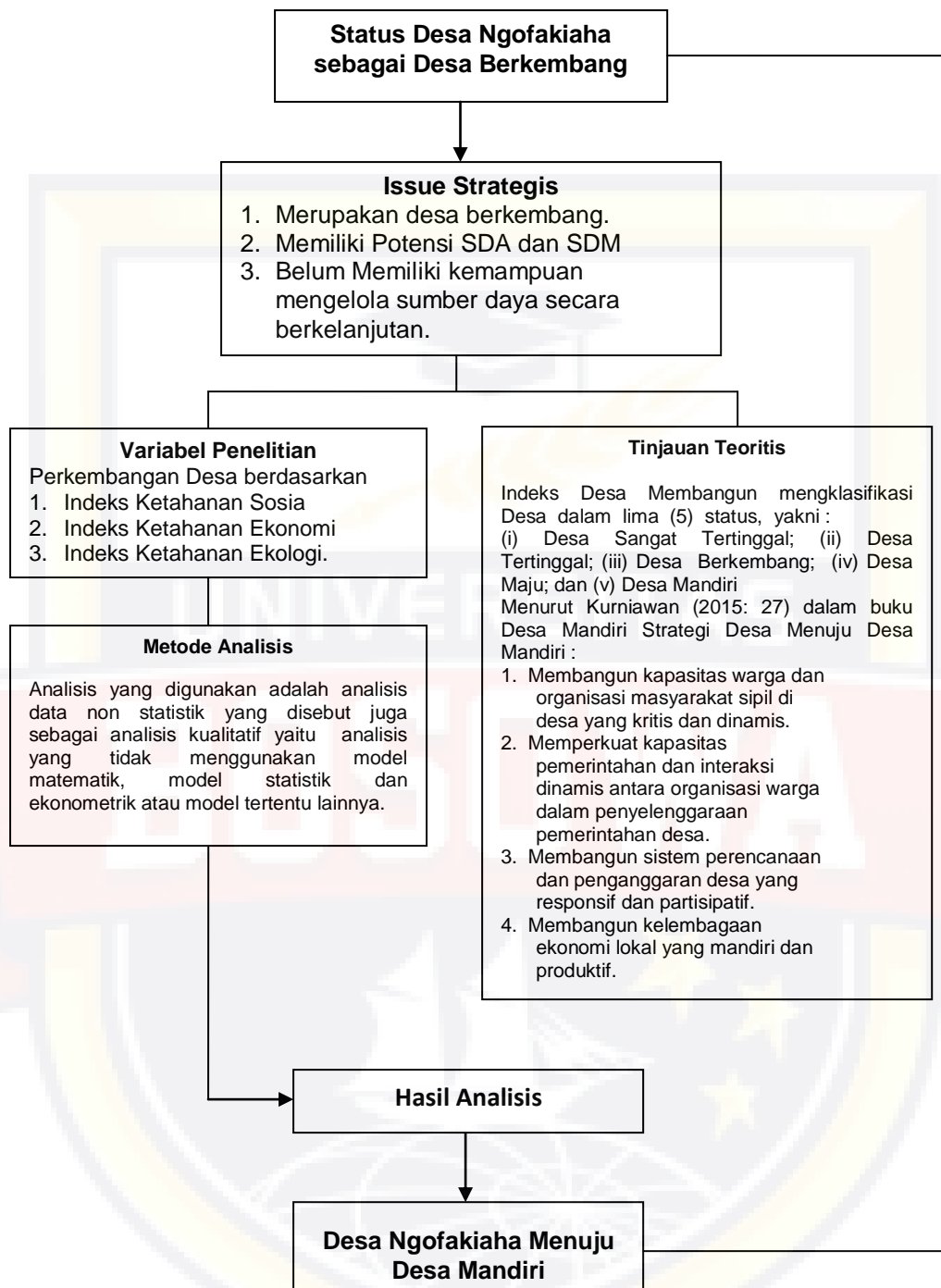
ini meneliti bagaimana desa menerapkan strategi menuju desa mandiri menurut Kementerian Desa. Sedangkan penelitian Edy Yusuf Agunggunanto, dkk meneliti bagaimana mewujudkan desa mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

H. Kerangka Pikir Penelitian.

Desa Ngofakiaha telah meningkat statusnya dari desa tertinggal menjadi desa berkembang. Desa berkembang atau yang disebut desa madya adalah desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Untuk menjadi desa mandiri Desa Ngofakiaha harus memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar - besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan Menurut Kementerian Desa strategi menuju desa mandiri dari dalam yaitu Pertama, membangun kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil di desa yang kritis dan dinamis. Kedua, memperkuat kapasitas pemerintahan dan interaksi dinamis antara organisasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Ketiga, membangun sistem perencanaan dan penganggaran desa yang responsif dan partisipatif. Keempat, membangun kelembagaan

ekonomi lokal yang mandiri dan produktif. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diringkaskan ke dalam gambar kerangka pikir sebagai berikut :





Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Penelitian tentang Analisis Faktor-Faktor Perkembangan Desa Dan Strategi Menuju Desa Mandiri peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2002:3).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat alamiah (*naturalistic*), penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik atau komputer (Kurniawan 2012 : 22). Hal yang penting dalam penelitian kualitatif adalah bagaimana peneliti mampu merumuskan kategori-kategori permasalahan sebagai sebuah konsep untuk memperbandingkan data.

Metode penelitian kualitatif membuka ruang yang cukup bagi dialog ilmu dalam konteks yang berbeda, terutama apabila ia dipahami secara mendalam dan “tepat”. Penelitian kualitatif dapat mengeksplorasi sikap, perilaku, dan pengalaman responden melalui metode interview dan fokus group. Pendekatan ini diharapkan mampu menjangkau realita dilapangan dengan mengumpulkan data

secara langsung dilapangan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Alasan peneliti menggunakan pendekatan ini yaitu untuk menggambarkan serta mendeskripsikan faktor-faktor perkembangan Desa Ngofakiaha dan strategi menuju desa mandiri. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan angka-angka. Sehingga dengan demikian dapat diperoleh penjelasan dan gambaran atas topik penelitian yang sesuai dengan judul penelitian yaitu “Analisis Faktor-Faktor Perkembangan Desa dan Strategi Menuju Desa Mandiri ”

B. Lokasi Penelitian.

Menurut Moleong (2004 : 86) menyatakan bahwa dalam penentuan lokasi penelitian baik cara yang ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan, sementara itu keterbatasan geografis dan praktis, seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga untuk dijadikan pertimbangan penentuan lokasi penelitian. Lokasi dalam penelitian ini ditentukan secara sengaja (purposive). Penentuan lokasi penelitian cara yang terbaik yang ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dalam menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan. Lokasi penelitian dalam hal ini merupakan tempat dimana peneliti melakukan analisis.

Lokasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah Desa Ngofakiaha Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan Desa Ngofakiaha merupakan salah satu desa yang sudah berkembang di kecamatan Malifut Halmahera Utara dan juga dikarenakan Desa Ngofakiaha memiliki potensi untuk menjadi desa mandiri.

C. Jenis dan Sumber Data.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2007:157). Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Data Primer.

Data Primer yaitu berupa kata-kata dan tindakan informan serta peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian. Yang kesemuanya berkaitan dengan permasalahan, pelaksanaan dan merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada di lapangan. Data primer diperoleh peneliti menggunakan teknik observasi dan mewawancarai informan.

2. Data Sekunder.

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau sumber data yang dicatat oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini

yaitu dapat berupa data-data yang berasal dari BPS, Kantor Desa dan karya ilmiah yang mendukung permasalahan seperti buku, majalah, artikel dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan.

D. Metode Sampel Penelitian.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*, sehingga terdapat informan kunci dan informan pendukung. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan informan dengan pertimbangan pada kemampuan informan untuk memberikan informasi selengkap mungkin kepada penulis. Sedangkan *snowball sampling* adalah teknik penentuan informan dengan mula-mula menentukan informan dalam jumlah kecil, kemudian membesar, jika informan yang telah dipilih belum memberikan informasi atau data yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun Informan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Fahri Yamin	Kepala Desa	Informan Utama
2	Faisal Sahraen	Kasi Pemerintahan Desa	Informan Utama
3	Tn. MH	Masyarakat desa	Infor. Penunjang
4	Tn. S	Masyarakat desa	Infor. Penunjang
5	Tn. BK	Masyarakat desa	Infor. Penunjang
6	Ny.NH	Masyarakat desa	Infor. Penunjang
7	Tn. YK	Masyarakat desa	Infor. Penunjang

Sumber: Diolah Peneliti.

E. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan berbagai teknik sebagai berikut:

1. Teknik Observasi.

Dalam penelitian kualitatif, prosedur pengumpulan data yang utama dipakai adalah observasi, khususnya observasi partisipatif yang melibatkan informan dan wawancara, yang keduanya bahkan boleh dibilang merupakan suatu kemutlakan (Tresiana, 2013:87). Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

Menurut Nazir (1999:212) observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata untuk tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Menurut Firdaus (2012:39) Observasi adalah teknik dalam memperoleh data melalui pengamatan terhadap suatu obyek atau orang pada periode tertentu. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap gejala objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang sedang diselidiki, disebut observer langsung.

Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya peristiwa yang diselidiki, misalnya peristiwa tersebut diamati melalui film atau

rangkaian slide atau rangkaian foto. Pengamatan dilakukan karena apa yang dikatakan orang sering kali berbeda dengan apa yang orang itu lakukan. Dalam melakukan pengamatan, digunakan strategi nonintervensi.

Teknik observasi ini digunakan untuk memperoleh data variable perkembangan desa Ngofakiaha dan strategi menuju desa mandiri dan juga untuk menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan di atas. Untuk penelitian ini peneliti mengadakan observasi dengan cara mengamati faktor-faktor perkembangan desa, strategi serta program-program pemerintah desa dalam menuju desa mandiri.

2. Teknik Wawancara.

Menurut Subagyo (2011:39) wawancara adalah kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2007:186).

Peneliti menggunakan teknik komunikasi langsung yang berbentuk wawancara tak berstruktur karena teknik ini memiliki kelebihan antara lain :

- a. Memungkinkan peneliti untuk mendapatkan keterangan dengan lebih cepat.
- b. Ada keyakinan bahwa penafsiran responden terhadap pertanyaan yang diajukan adalah tepat.
- c. Sifatnya lebih luas.
- d. Pembatasan-pembatasan dapat dilakukan secara langsung, apabila jawaban yang diberikan melewati batas ruang lingkup masalah yang diteliti.
- e. Kebenaran jawaban dapat diperiksa secara langsung.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara secara terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara, yang dapat dikembangkan menjadi wawancara mendalam saat riset, agar mendapatkan informasi lebih akurat.

3. Teknik Dokumentasi.

Dokumen ialah setiap bahan tertulis atau film yang dipersiapkan karena adanya permintaan dari seorang penyidik (Moleong, 2007:216). Sedangkan menurut Burhan Bungin (2011:142) dokumen adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.

Teknik dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan

transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen surat dan lain-lain (Arikunto, 2002:206). Sesuai dengan pengertian tersebut metode dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan faktor-faktor perkembangan Desa Ngofakiaha dan strategi menuju desa mandiri.

F. Teknik Pengolahan Data.

Setelah data diperoleh dari lapangan terkumpul maka tahap berikutnya ialah mengolah data tersebut. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data sebagaimana yang disebutkan Moleong (2006: 151) meliputi :

1. Editing.

Pada tahapan ini, data yang telah terkumpul melalui daftar pertanyaan ataupun pada wawancara perlu dibaca kembali untuk melihat apakah ada hal-hal yang masih meragukan dari jawaban informan. Jadi, editing bertujuan untuk memperbaiki kualitas data dan menghilangkan keraguan.

2. Interpretasi.

Setelah data yang terkumpul dianalisis dengan teknik statistik hasilnya harus diinterpretasi atau ditafsirkan agar kesimpulan kesimpulan penting mudah ditangkap oleh pembaca. Interpretasi merupakan penjelasan terperinci tentang arti

sebenarnya dari materi yang dipaparkan selain itu juga dapat menemukan arti yang lebih luas dari penemuan penelitian.

G. Metode Analisis Data.

Menurut Widi (2010:253) analisis data merupakan proses penghimpunan atau pengumpulan, permodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis data berdasarkan Rekapitulasi Data Indeks Desa Membangun tahun 2017.

Menurut Silaen (2013:177) analisis data adalah suatu kegiatan untuk mengelompokkan, membuat suatu urutan, serta menyingkat data sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami. Menurut Arikunto (2010:53) pengolahan data adalah mengubah data mentah menjadi data yang lebih bermakna yang mengarah pada kesimpulan.

Analisis data dibagi menjadi dua yaitu analisis data statistik dan analisis data non statistik, mengingat data penulisan ini tidak berupa hasil tetapi proses maka analisis yang digunakan adalah analisis data non statistik yang disebut juga sebagai analisis kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan model matematik, model statistik dan ekonometrik atau model tertentu lainnya.

Analisis data dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya seperti pada pengecekan data dan tabulasi, dalam hal ini sekedar membaca tabel-tabel, grafik-grafik atau angka-angka yang tersedia kemudian melakukan uraian dan penafsiran (Hasan,2002:98).

Data dianalisis dan di olah dengan cara :

1. Pengumpulan data, pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari data dan mengumpulkan berbagai jenis data atau sumber dilapangan yang mendukung penelitian ini.
2. Reduksi data, reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan di verivikasi.
3. Penyajian data, penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4. Menarik kesimpulan, kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada catatan dilapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagai makna yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya yaitu merupakan validitasnya.

H. Teknik Keabsahan Data.

Teknik keabsahan data atau kredibilitas data adalah cara menyelaraskan antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang terjadi pada obyek penelitian. Teknik keabsahan data dilakukan untuk mendapatkan data yang valid. Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data dengan cara uji kredibilitas melalui proses Triangulasi. Teknik triangulasi merupakan proses membandingkan dan mengecek tingkat kepercayaan informasi melalui proses wawancara dan studi dokumentasi. Hasil wawancara dan studi dokumentasi dikumpulkan berdasarkan derajat kesamaan informasi, sehingga data yang diperoleh memiliki keselarasan dan kepercayaan yang sesuai.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik menguji data dan informasi dengan cara mencari data yang sama dengan informan satu dan lainnya. Data dari informan telah dikompilasikan dengan hasil dokumentasi yang memiliki kesamaan informasi. Teknik triangulasi sumber bertujuan untuk memperoleh data yang sama dan memiliki tingkat validitas yang tinggi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Halmahera Utara.

1. Aspek Fisik Dasar.

a. Letak Geografis dan Batas Administrasi.

Kabupaten Halmahera Utara adalah daerah berwilayah kepulauan, secara astronomis terletak antara 1°57" Lintang Utara – 3°00" Lintang Selatan dan 127°17" Bujur Timur – 129°08" Bujur Timur,. Secara geografis Kabupaten Halmahera

Utara berbatasan dengan ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Morotai
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Halamera Barat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Barat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Timur

Bentang wilayah Kabupaten Halmahera Utara (Halut) merupakan Kabupaten bahari, hal ini terlihat dari keadaan geografis Kabupaten Halmahera Utara yang berupa kepulauan yang terdiri dari sekitar 216 pulau dan sebagian besar terletak di Pulau Halmahera . Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Halmahera Utara setelah pemekaran Kabupaten

Halmahera Utara (UU No. 53/208) adalah 22.507,32 km² yang meliputi luas daratan 4.951,61 km² (22%) dan lautan 17.555,71 km² (78%). Berikut peta administrasi Kabupaten Halmahera Utara, ditunjukkan dalam gambar 4.1 berikut ini :



JUDUL :
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERKEMBANGAN DESA
DAN STRATEGI MENUJU DESA MANDIRI

GAMBAR
PETA ADMINISTRASI
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

SKALA
1 : 650.000

Legenda

- Sungai
- Jalan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Ibu Kota
 - kabupaten
 - kecamatan

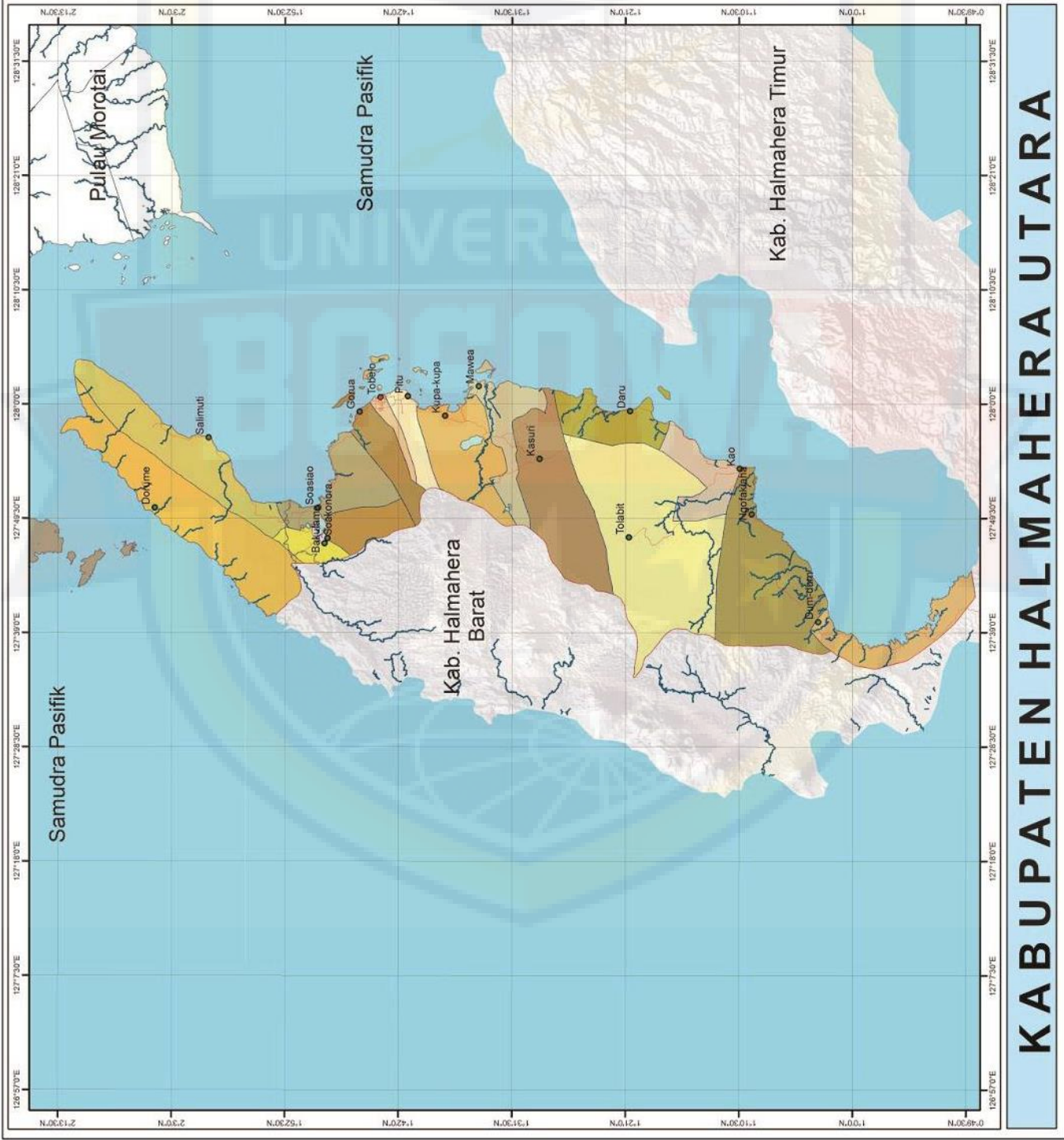
KECAMATAN

- Kec. Galela
- Kec. Galela Barat
- Kec. Galela Selatan
- Kec. Galela Utara
- Kec. Kao
- Kec. Kao Barat
- Kec. Kao Teluk
- Kec. Kao Utara
- Kec. Loloda Kepulauan
- Kec. Loloda Utara
- Kec. Malifut
- Kec. Tobelo
- Kec. Tobelo Barat
- Kec. Tobelo Selatan
- Kec. Tobelo Tengah
- Kec. Tobelo Timur
- Kec. Tobelo Utara

SUMBER : B. HALMAHERA UTARA
PETA RABOTERRESTRIAL
BAPPEDA KAB. HALMAHERA UTARA

PEMBIMBING :
DR. IR. SYAHRUAR TATTO, MS
IR. JUFRADI, MSP

MAHASISWA :
M. SAURI SAHRUN
45 12 042 005



b. Kondisi Topografi dan Kelerengan.

Secara morfologi, kondisi topografi Kabupaten Halmahera Utara cukup bervariasi yaitu Dataran, Pantai, Perbukitan dan Pegunungan dengan kelerengan yang bervariasi. Tercatat sebanyak 2 dataran, 5 gunung, 6 danau dan 61 buah sungai berada di wilayah Kabupaten Halmahera Utara.

c. Kondisi Geologi dan Jenis Tanah.

Geologi Kabupaten Halmahera Utara terdiri dari jenis Secara umum, kondisi geologi Kabupaten Halmahera Utara terbentuk dari batuan penyusun meliputi batuan sedimen, batuan, vulkanis, batuan terobosan, dan batuan hasil proses tektonis.

d. Kondisi Klimatologi.

Keadaan Iklim di Kabupaten Halmahera Utara hampir sama dengan beberapa Kabupaten pada umumnya dan memiliki suhu udara berkisar antara 20°C – $33,5^{\circ}\text{C}$. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Juni dan curah hujan terendah terjadi pada bulan September dengan rata-rata curah hujan antara 200 – 300 mm per tahun.

e. Kondisi Hidrologi.

Secara hidrologi Kabupaten Halmahera Utara memiliki kondisi kedalaman air tanah yang terbagi antara tiga kategori, yaitu <10 meter, antara 10-25 meter, dan antara 25-100 meter.

f. Jarak Antar Ibukota Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara.

Data jarak antar Ibukota Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Utara, menjadi sangat penting dibutuhkan dalam menganalisa pola interaksi antar wilayah kecamatan. Bisa juga dikatakan sebagai analisa daya tarik antar Ibukota Kecamatan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara. Untuk data jarak ibukota kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara disajikan dalam tabel berikut :

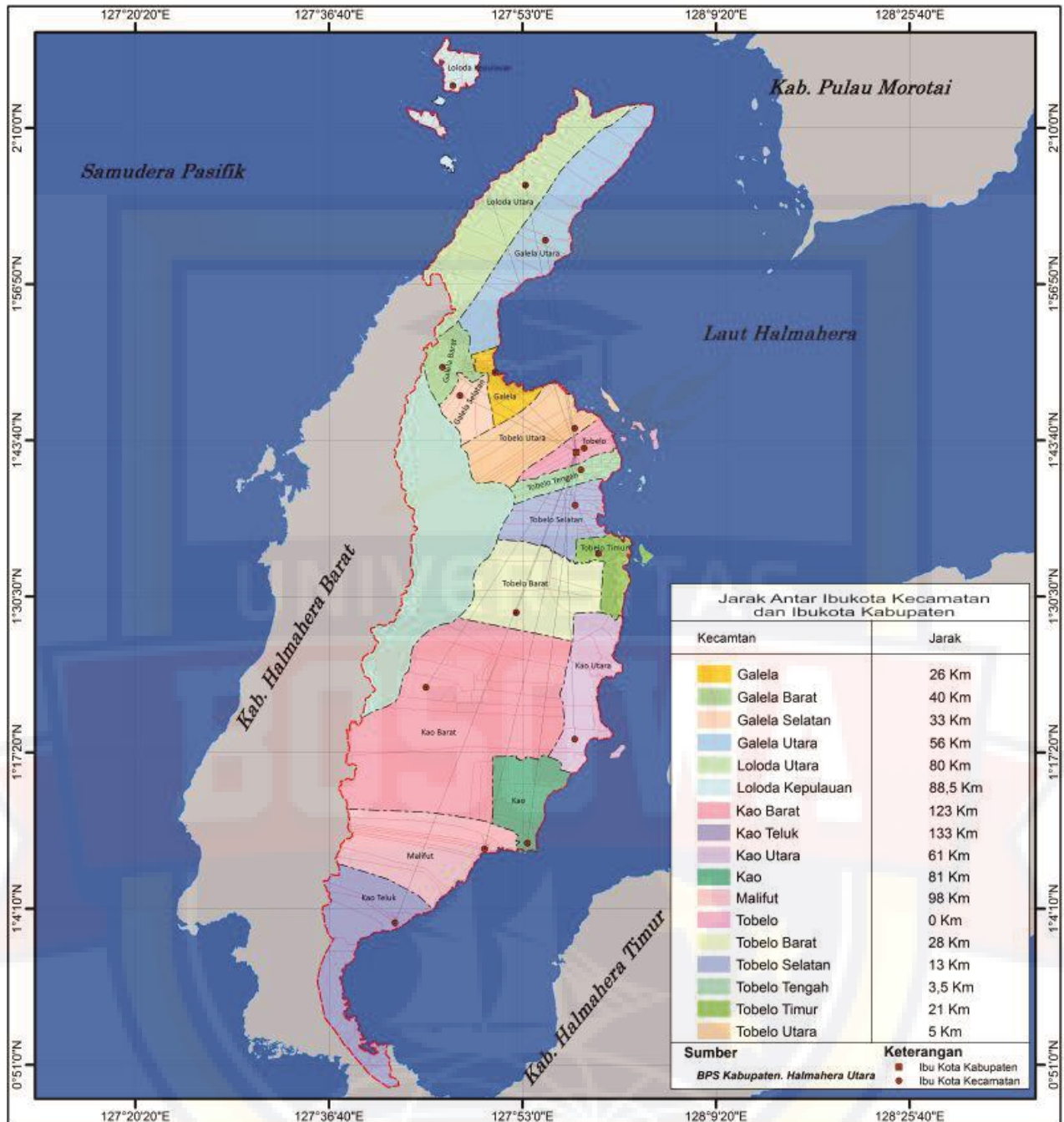
4.1 Jarak Antara Ibukota Kabupaten (Tobelo) Ke Ibukota Kecamatan-Kecamatan.

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak (km)	Tinggi DPL* (m)
(1)	(2)	(3)	(4)
Malifut	Ngofakiaha	97	6
Kao	Kao	81	5
Kao Utara	Daru	61	4
Kao Barat	Tolabit	123	25
Kao Teluk	Dum Dum	133	7
Tobelo	Gamsungi	0	6
Tobelo Tengah	Pitu	3,5	6
Tobelo Utara	Gorua	5	5
Tobelo Selatan	Kupa Kupa	13	9
Tobelo Timur	Mawea	21	5
Tobelo Barat	Kusari	28	17
Galela	Soa Sio	26	8
Galela Utara	Salimuli	56	7
Galela Selatan	Soakonora	33	30
Galela Barat	Dokulamo	40	13
Loloda Utara	Dorume	80	3
Loloda Kepulauan	Dama	88,5	18

Sumber : BAPPEDA dan BPS Kab. Halmahera Utara, 2017.

Data pada tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa jarak terjauh ibukota kecamatan terhadap Kota Gamsungi (Ibukota Kabupaten Halmahera Utara) adalah Kota Dum Dum, ibukota Kecamatan Kao Teluk yaitu berjarak 133 Km. Sedangkan jarak terdekat ke Ibukota Kecamatan Tobelo adalah jarak dari Ibukota Kecamatan Tobelo Utara (Kota Gorua) yaitu berjarak 5 Km.

Jarak antar ibukota Kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara sangat berpengaruh terhadap pergerakan penduduk di wilayah tersebut. Perilaku sosial masyarakat, baik itu keputusan untuk mencari pekerjaan, bersekolah, bisnis/usaha, dan interaksi sosial lainnya, diputuskan berdasarkan jauh dekatnya suatu wilayah. Gambaran interaksi geografi atau gaya tarik antar wilayah dapat dilihat pada peta jarak antara ibukota kecamatan berikut :



ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERKEMBANGAN DESA DAN STRATEGI MENUJU DESA MANDIRI



2. Aspek Kependudukan.

a. Jumlah Penduduk Tahun 2017.

Jumlah penduduk di Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2017 jumlah adalah 183.596 jiwa, yang terdiri dari 93.806 laki-laki dan 89.790 perempuan Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kab. Halmahera Utara Tahun 2017.

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Penduduk (jiwa)
1	Malifut	6,337	6,055	12.392
2	Kao Teluk	2,063	1,949	4.012
3	Kao	4,314	4,057	8.371
4	Kao Barat	4,777	4,317	9.094
5	Kao Utara	6,137	5,725	11.862
6	Tobelo Selatan	7,498	7,257	14.755
7	Tobelo Barat	2,515	2,392	4.907
8	Tobelo Timur	3,707	3,369	7.076
9	Tobelo	17,421	16,678	34.099
10	Tobelo Tengah	7,227	7,193	14.420
11	Tobelo Utara	5,561	5,542	11.103
12	Galela	4,307	4,248	8.555
13	Galela Selatan	4,291	4,194	8.485
14	Galela Barat	5,355	5,118	10.473
15	Galela Utara	4,032	3,77	7.802
16	Loloda Utara	4,93	4,634	9.564
17	Loloda Kepulauan	3,334	3,292	6.626
Jumlah Total		93,806	89,79	183.596

Sumber : Kabupaten Halmahera Utara Dalam Angka Tahun 2017

b. Distribusi dan Kepadatan Penduduk.

Distribusi atau tingkat persebaran penduduk relatif tersebar merata di setiap Kecamatan, hal ini disebabkan

sebaran infrastruktur yang juga tersebar hampir merata di Kabupaten Halmahera Utara.

Dengan luas wilayah daratan 4.951,61 km² dan jumlah penduduk sebanyak 183.596 jiwa maka kepadatan penduduk Kota Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2016 sebesar 58,61 jiwa/km². Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017.

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1.	Malifut	12.392	374.10	33,12
2.	Kao Teluk	4.012	111.20	36,07
3.	Kao	8.371	128.80	64,99
4.	Kao Barat	9.094	596.70	15,24
4.	Kao Utara	11.862	135.40	87,60
6.	Tobelo Selatan	14.755	33.0	447,12
7.	Tobelo Barat	4.907	56.0	87,62
8	Tobelo Timur	7.076	100.40	70,47
9	Tobelo	34.099	204.30	166,90
10.	Tobelo Tengah	14.420	120.0	120,16
11	Tobelo Utara	11.103	294.70	37,67
12	Galela	8.555	138.70	61,67
13	Galela Selatan	8.485	255.30	33,23
14	Galela Barat	10.473	84.50	123,94
15	Galela Utara	7.802	45.50	171,47
16	Loloda Utara	9.564	390.40	24,49
17	Loloda Kepulauan	6.626	63.30	104,67
Jumlah Total		183.596	3132,3	1686,5

Sumber : Kabupaten Halmahera Utara Dalam Angka Tahun 2017

B. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Malifut.

1. Aspek Fisik Dasar.


a. Letak Geografis dan Administrasi.

Luas wilayah Kecamatan Malifut tercatat 374,10 Km² yang terbagi menjadi 22 (dua puluh dua) Desa. Batasan-batasan administratif Kecamatan Malifut sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Kao Utara
- Sebelah Selatan : Kecamatan Kao Teluk
- Sebelah Barat : Kabupaten Halmahera Barat
- Sebelah timur : Kecamatan Kao Teluk

Kecamatan Malifut dalam angka 2017, berdasarkan data BPS Kabupaten Halmahera Utara tercatat jumlah penduduk secara keseluruhan adalah 12.392 jiwa. Jika dibagi berdasarkan jenis kelamin ada 5.129 jiwa laki-laki dan 7.263 jiwa perempuan. Peta administrasi Kecamatan Malifut digambarkan sebagai berikut :

Judul Peta:
Administrasi Kecamatan Malifit



Skala: 1 : 135.000

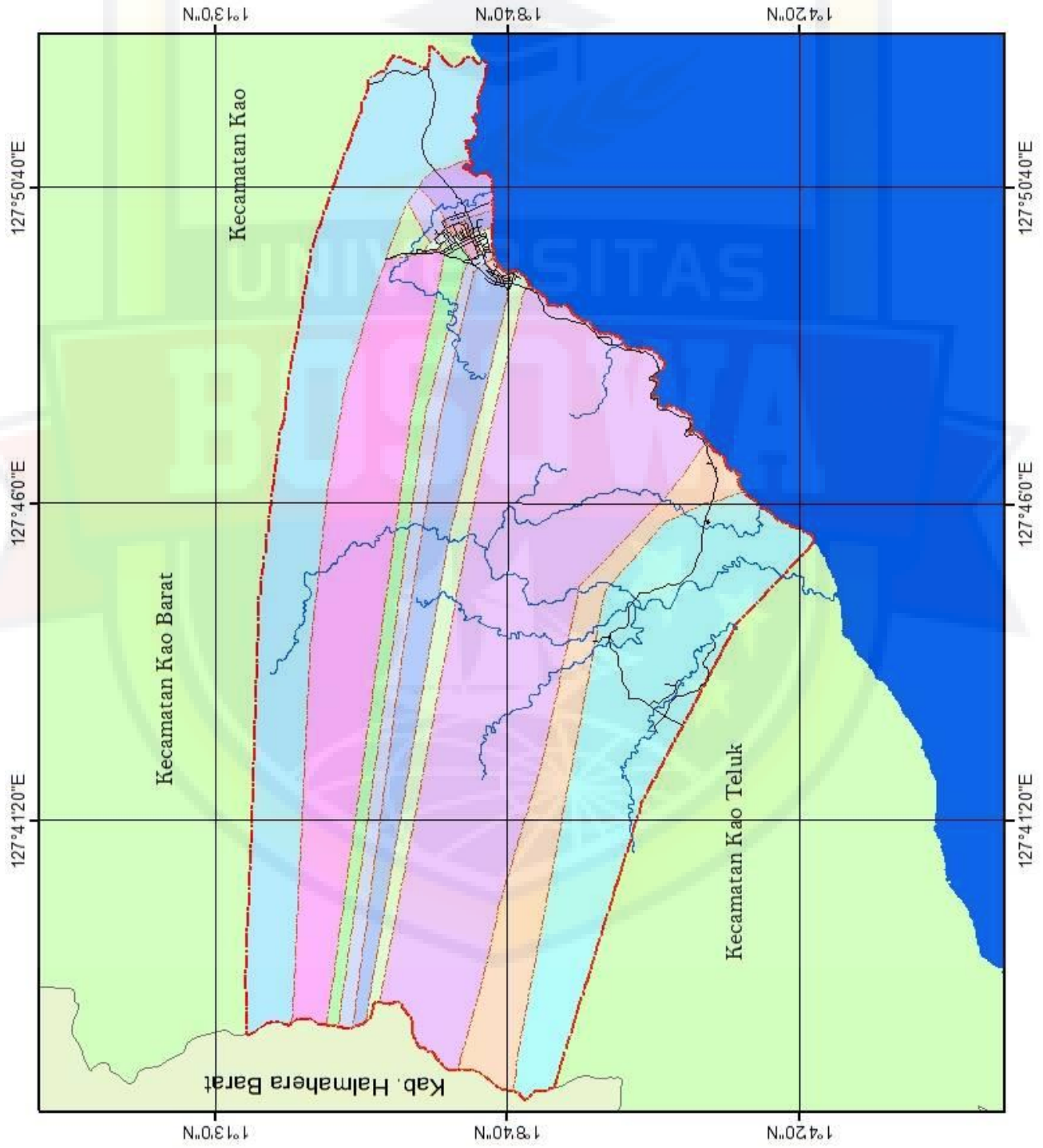
Keterangan

Batas Administrasi
 - - - - - Batas Kecamatan
 - - - - - Batas Kelurahan/Desa

Jalan
 Sungai
 Laut

DESA

BALISOSANG	SABALE
BOBAWA	SAMSUMA
BUKIT TINGGI	SOMA
GAYOK	SOSOL
MALOA	TAEBO
MALAPA	TAFASOHO
MATSA	TAGONO
NGOFABAWA	TAHANE
NGOFAGITA	TALAPAO
NGOFAKAJAHA	TERPADU
PELERI	WANGEOTAK



b. Topografi dan Kelerengan.

Beedasarkan data topografi, Kecamatan Malifut berada pada ketinggian antara 0 sampai 499 mdpl. Sementara, kondisi kemiringan lereng berkisar antara 0-5 %.

c. Geologi dan Jenis Tanah.

Secara geologi, jenis batuan di Kecamatan Malifut terdiri dari jenis batuan satuan aluvial, serta satuan tufa dan breksi. Sedangkan jenis tanah terdiri dari tanah inceptisol dan ultisol.

d. Klimatologi.

Secara klimatologi Kecamatan Malifut terletak pada posisi iklim musim timur yang mengenal 2 (dua) musim, yaitu musim penghujan (bulan basah) yang jatuh antara bulan Juni-September dan musim kemarau (bulan kering) yang berlangsung pada periode Januari-Mei. Curah Hujan setiap tahun mencapai 1.500-2.000 pertahun , dengan suhu udara rata - rata berkisar antara 26°C - 32°C.

e. Hidrologi.

Secara hidrologi Kecamatan Malifut terdapat air permukaan dan air bawah tanah yang dapat digunakan dan telah di gunakan oleh sebagian warga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi kedalaman air tanah di Kecamatan Malifut berada antara >5 -50 meter.

2. Aspek Kependudukan.

Jumlah penduduk Kecamatan Malifut berdasarkan data BPS Kabupaten Halmahera Utara adalah 12.392 jiwa. Tabel berikut menggambarkan jumlah penduduk di Kecamatan Malifut ;

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Malifut Tahun 2017

No.	Nama Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Tahane	198	257	455
2	Bukit Tinggi	123	289	412
3	Matsa	176	344	520
4	Ngofakiaha	221	223	444
5	Terpadu	272	410	682
6	Samsuma	192	367	559
7	Ngofagita	269	183	452
8	Paleri	485	162	647
9	Malapa	225	719	944
10	Mailoa	217	160	377
11	Ngofabobawa	281	232	513
12	Soma	260	424	684
13	Tagono	292	397	689
14	Bobawa	119	389	508
15	Tafasoho	196	339	535
16	Talapao	272	351	623
17	Sabaleh	279	496	775
18	Tabobo	194	223	417
19	Balisosang	197	251	448
20	Sosol	171	287	458
21	Gayok	277	374	651
22	Wangeotak	213	386	599
JUMLAH		5129	7263	12.392

Sumber : Kecamatan Malifut Dalam Angka Tahun 2017

Penduduk kecamatan Malifut terdiri dari berbagai suku yang datang dari berbagai wilayah di Nusantara. Mayoritas suku yang

menempati kecamatan Malifut merupakan suku Makian sebesar kurang lebih 80%, yang melakukan transmigrasi lokal sejak tahun 1975 akibat ancaman letusan Gunung Kie Besi yang diprediksi akan meletus pada tahun itu oleh pemerintah pusat. Tabel berikut menggambarkan keadaan sosio cultural masyarakat di Kecamatan Malifut ;

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku/Etnis di Kecamatan Malifut Tahun 2017

No.	Nama Desa	Suku/Etnis		Jumlah
		Makian	Lain-lain	
1	Tahane	404	51	455
2	Bukit Tinggi	228	184	412
3	Matsa	296	224	520
4	Ngofakiaha	221	223	444
5	Terpadu	272	410	682
6	Samsuma	192	367	559
7	Ngofagita	349	103	452
8	Paleri	445	202	647
9	Malapa	819	125	944
10	Mailoa	217	160	377
11	Ngofabobawa	281	232	513
12	Soma	260	424	684
13	Tagono	292	397	689
14	Bobawa	239	269	508
15	Tafasoho	359	176	535
16	Talapao	473	150	623
17	Sabaleh	596	179	775
18	Tabobo	294	123	417
19	Balisosang	197	251	448
20	Sosol	278	180	458
21	Gayok	277	374	651
22	Wangeotak	419	180	599
JUMLAH		5129	7263	12.392

Sumber : Kecamatan Malifut Dalam Angka Tahun 2017

Perpindahan masyarakat suku Makian ke daratan Halmahera ini dilakukan secara bedol kecamatan (memindahkan seluruh perangkat pemerintahan). Sampai hari sekitar 20 % penduduk Kecamatan Malifut merupakan berbagai suku dan etnis yaitu Togutil (suku pedalaman Halmahera), Bugis, Makassar, Buton, Ambon dan Etnis keturunan China (Tiongkok). Kerusuhan Horisontal (antar agama dan etnis) tahun 1999 menjadi ujian dalam bermasyarakat dan menjadi tolak ukur toleransi antar masyarakat.

Jumlah penduduk yang sedang bekerja dan angka pencari kerja di Kecamatan Malifut juga sangat mengkhawatirkan, dikarenakan banyaknya penduduk yang belum bekerja atau dikatakan pengangguran. Berdasarkan data BPS Kecamatan Malifut tahun 2017, ternyata mayoritas penduduk yang sudah bisa bekerja (usia produktif) masih banyak yang belum bekerja. Tabel berikut menggambarkan masih banyaknya pengangguran di Kecamatan Malifut di tahun 2017 ;

**Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan
di Kecamatan Malifut Tahun 2017**

NAMA DESA	PENGANGGURAN	PNS	PETANI	NELAYAN	SOPIR	Wiraswasta/ pedagang	TOTAL
Tahane	67	3	20	12	0	9	111
Bukit Tinggi	35	2	33	13	0	6	89
Matsa	52	0	27	1	2	3	85
Ngofakiaha	26	17	35	7	7	12	104
Terpadu	86	3	25	14	0	3	131
Samsuma	93	1	30	5	4	0	133
Ngofagita	61	0	12	0	0	0	73
Paleri	27	0	7	0	0	8	42
Malapa	18	5	23	0	0	4	50
Mailoa	29	2	15	0	0	1	47
Ngofabobawa	63	0	22	0	5	0	90
Soma	28	0	4	0	2	0	34
Tagono	33	5	8	0	0	0	46
Bobawa	86	1	31	0	0	0	118
Tafasoho	53	0	42	0	0	0	95
Talapao	29	2	23	7	3	0	64
Sabaleh	64	3	5	12	8	0	92
Tabobo	38	4	12	0	0	3	57
Balisosang	47	0	8	0	0	1	56
Sosol	82	0	21	0	2	0	105
Gayok	59	3	35	0	5	0	102
Wangeotak	43	4	12	0	1	0	60
JML	1.119	55	450	71	39	50	1.784
Persentase	62,70%	3,08%	25,20%	3,97%	2,18%	2,80%	100 %

Sumber : Kecamatan Malifut Dalam Angka Tahun 2017

Tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa angka pengangguran cukup tinggi yaitu 1.119 jiwa atau 62,70% dari jumlah penduduk produktif. Artinya ada sejumlah orang produktif yang belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Sedangkan lima (5) kategori yang sedang atau sudah bekerja paling banyak adalah sebagai petani

yaitu 450 jiwa atau 25,20%, PNS sebanyak 3,08% dan nelayan 3,97% serta yang berprofesi sebagai sopir angkot sebanyak 2,18%.

Sedangkan dari total jumlah penduduk 12.392 jiwa di Kecamatan Malifut, terdapat 2.379 kepala keluarga (KK). Data tentang jumlah KK dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7 Jumlah Rumah Tangga di Kecamatan Malifut Tahun 2017

No	Desa	Penduduk	Rumah Tangga
1	Tahane	455	84
2	Bukit Tinggi	412	71
3	Matsa	520	105
4	Ngofakiaha	444	79
5	Terpadu	682	124
6	Samsuma	559	85
7	Ngofagita	452	79
8	Paleri	647	118
9	Malapa	944	172
10	Mailoa	377	61
11	Ngofabobawa	513	114
12	Soma	684	137
13	Tagono	689	128
14	Bobawa	508	103
15	Tafasoho	535	117
16	Talapao	623	142
17	Sabaleh	775	159
18	Tabobo	417	82
19	Balisosang	448	89
20	Sosol	458	82
21	Gayok	651	131
22	Wangeotak	599	117
Jumlah		12.392	2.379

Sumber : Kecamatan Malifut Dalam Angka Tahun 2017

Tabel 4.7 Tentang jumlah Rumah Tangga di Kecamatan Malifut menunjukkan bahwa, jumlah rumah tangga terbanyak yaitu di Desa Malapa, dengan 1.72 rumah tangga (KK), sedangkan paling sedikit yaitu di desa Mailoa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 61 KK.

C. Tinjauan Wilayah Penelitian.

1. Sejarah Desa Ngofakiaha.

Desa Ngofakiaha adalah sala satu desa translok dari kepulauan Makian, yang sekarang bertempat di Kecamatan Malifut kabupaten Halmahera Utara, dan merupakan ibu kota kecamatan Malifut dari 22 Desa. Nama Ngofakiaha di ambil dari dasar sejarah anak yang tua dari 22 Desa.

Desa Ngofakiaha merupakan desa yang tertua dari 22 desa di Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara yang berdiri pada tahun 1975, dengan luas wilayah Desa Ngofakiaha mencakup 15 Ha, yang teletak di tengah–tengah dari 22 desa, yang mana letak perbatasan wilayah bagian barat Desa Bobawa, bagian selatan Desa Samsuma, bagian Timur Desa Ngofagita Dan Bagian Utara Desa Malapa. Kehidupan bermasyarakat Desa Ngofakiaha mencakup semua golongan, etnis, suku dan agama.

Pada awal tahun terbentuknya Desa Ngofakiaha dibawah pimpinan seorang kepala desa yang bernama Hi. Tada Safi beliau merupakan seorang kepala Desa yang menjabat di Desa

Ngofakiaha Kepulauan Makian dan dipindahkan ke Desa Ngofakiaha Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara.

Berikut daftar nama orang-orang yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa sejak berdiri hingga sekarang ;

Tabel 4.8 Nama- Nama Kepala Desa di Desa Ngofakiaha Yang Pernah Menjabat Hingga Sekarang

NO	NAMA KEPALA DESA	JABATAN	MASA JABATAN	KETERANGAN
1	Hi. Tada Safi	Sangaji Kampong	1971 - 1985	Almarhum
2	Ali Barham	Kades	1985 - 1994	Almarhum
3	Hairudin Safi	Pejabat	1994 - 1994	Masih Hidup
4	Ahmad Mansur	Kades	1994 - 2002	Almarhum
6	Abubakar Soleman	Pejabat	2003 - 2003	Masih Hidup
7	Sahrin Hi. M Saleh	Kades	1003 - 2009	Masih Hidup
8	Lilian Marwati Sawotong	Pejabat	2010 - 2010	Masih Hidup
9	Ade Ibrahim	Kades	2010 - 2016	Masih Hidup
10	Djakaria Siraju	Pejabat	2016 - 2016	Masih Hidup
11	Fahri Yamin	Kades	2017 - 2023	Masih Hidup

Sumber : Data Monografi Desa Ngofakiaha 2017.

2. Letak Geografis.


Secara administratif desa Nfokiaha merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara, yang terletak di arah selatan Kabupaten Halmahera Utara dengan jarak dari Ibu Kota Kabupaten ke Kecamatan Malifut 97 km dengan waktu tempuh 90 menit, sedangkan jarak dari Desa Ngofakiaha ke kota kecamatan 0 km dengan waktu tempuh 0 menit perjalanan. Hal ini dikarenakan Desa Ngofakiaha merupakan Ibukota Kecamatan dan merupakan pusat aktifitas kegiatan pemerintahan, perdagangan dan aktifitas sosial.

Wilayah Desa Ngofakiaha terdiri dari 4 (empat) RT, yaitu RT 01, 02, 03 dan RT 04 masing - masing RT dipimpin oleh Ketua RT Desa Ngofakiaha terbagi dalam 4 (empat) rukun tetangga (RT), dengan luas wilayah 15 Ha. Sebagian besar penghuni desa merupakan warga asli Desa Ngofakiaha, ada juga sebagian merupakan pendatang yang berasal dari luar suku desa Ngofakiaha. Dengan batas-batas sebagai berikut :


- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Malapa.
- Sebelah Barat berbatasan Desa Bobawa.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Samsuma.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ngofagita.

Dengan luas wilayah yang tidak begitu luas, Desa Ngofakiaha mengandalkan sektor pertanian perkebunan dan sektor peternakan sebagai potensi unggulan. Selain itu masyarakat juga mengandalkan potensi lain yaitu sumber daya manusia (SDM) dimana jumlah penduduk yang bersekolah diatas SLTA sederajat bahkan lulusan Strata Satu (S1) juga sudah cukup banyak di desa Ngofakiaha. Informasi peta tentang Desa Ngofakiaha disajikan dalam gambar Berikut :

Judul Peta: Administrasi Kelurahan Ngofakiaha






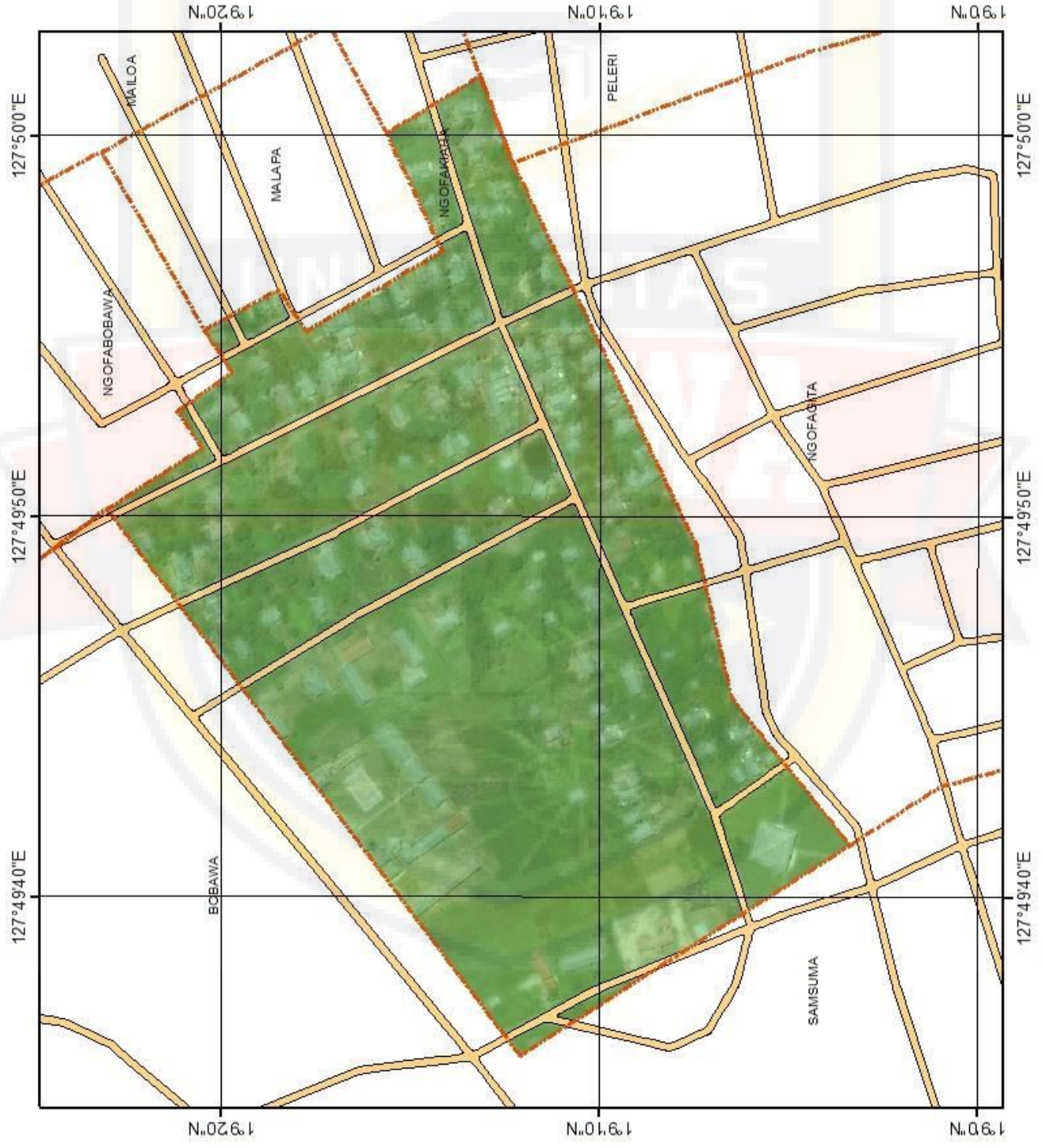
Skala: 1 : 4.000



Keterangan

Batas Administrasi

-  Batas Kelurahan/Desa
-  Jalan
-  Kelurahan Ngofakiaha



3. Topografi Dan Jenis Tanah.

Secara Topografi Desa Ngofakiaha berada didataran rendah dengan ketinggian antara 0 s/d 5 m di atas permukaan laut, suhu udara di daerah ini cukup bervariasi antara 40° C saat paling dingin dan 60° C saat paling panas.

Jenis tanah yang ada di Wilayah ini adalah jenis tanah Lempung, yang mana merupakan campuran antara tanah liat dan pasir yang berwarna coklat.

4. Iklim.

Iklim merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan tanaman. Iklim Desa Ngofakiaha termasuk dalam daerah dengan tipe iklim D dengan nilai Q antara 60 % - 100 %. Nilai Q adalah perbandingan antara banyaknya bulan basah dibagi dengan bulan kering kali 100 %, (*Sumber : Kantor Desa Ngofakiaha*).

5. Sistem Usaha Tani.

Ada 2 jenis sistem usaha tani yang ditinjau dari jenis komoditas adalah sebagai berikut :

1. Komoditas Pertanian antara lain cabe, tomat dan kacang tanah
2. Komoditas Perkebunan antara lain kelapa, pala, rambutan, durian dan cengkeh.

Dari komoditas pertanian dan perkebunan di Desa Ngofakiaha yang merupakan komoditas unggulan adalah cabe,

durian dan cengkeh. Masyarakat lebih mengandalkan perkebunan cabe, durian dan cengkeh, dikarenakan pada saat musim panen keuntungan yang didapatkan lebih besar dari panen hasil pertanian dan perkebunan lainnya.



Gambar 4.5 Pertanian Cabe



Gambar 4.6 Pertanian Tomat

Selain itu, masyarakat juga melakukan beberapa usaha di bidang peternakan dan perikanan, yaitu peternakan Sapi Bali dan pertambakan ikan Gurame. Berikut dokumentasi pertanian cabe dan tomat serta peternakan Sapi Bali dan tambak ikan Gurame yang ada di Desa Ngofakiaha :



Gambar 4.5 Ternak Sapi Bali



Gambar 4.6 Tambak Ikan Gurame

6. Kependudukan.

Pada tahun 2016 jumlah penduduk Desa Ngofakiaha sebanyak 435 jiwa sesuai dengan data monografi Desa Ngofakiaha dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 66 yang tersebar di empat RT yang terdiri jumlah jiwa laki laki 230 dan jumlah jiwa perempuan 205. Namun pada tahun 2017 jumlah penduduk Desa Ngofakiaha mengalami penambahan jumlah jiwa dan Jumlah

Kepala Keluarga. Jumlah penduduk desa Ngofakiaha dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 9 Klasifikasi Penduduk Menurut Jenjang Umur Dan Jenis Kelamin 2017.

No	Kelompok Umur (Tahun)	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah (Jiwa)
1	<1	4	2	6
2	1 – 3	11	12	23
3	4 – 5	15	4	19
4	6 – 12	33	32	65
5	13 – 15	14	19	33
6	16 – 19	23	15	38
7	20 – 24	12	22	34
8	25 – 30	22	21	43
9	31 – 35	21	25	46
10	36 – 40	12	7	19
11	41 – 50	28	26	54
12	51 – 60	16	32	48
13	61 >	10	6	16
Jumlah		221	223	444

Sumber : Data Monografi Desa Ngofakiaha 2017.

Dari tabel data diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk Desa Ngofakiaha pada tahun 2017 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan jumlah penduduk di tahun 2016, dimana dari hasil validasi, verifikasi dan pemutahiran data yang dilaksanakan pada tahun 2017 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Ngofakiaha sebanyak 444 jiwa terbagi atas laki-laki 221 jiwa dan perempuan 223 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga

(KK) sebanyak 79 KK, yang tersebar di empat rukun tetangga (RT).

Tabel 4.10. Jumlah jiwa pilih penduduk Desa Ngofakiaha

NO	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1	Laki – Laki	137
2	Perempuan	161
	Jumlah	298

Sumber : Data Monografi Desa Ngofakiaha, 2017.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah jiwa pilih penduduk Desa Ngofakiaha pada tahun 2017 yang terdaftar didalam daftar pilih tetap (DPT) Sebanyak jiwa yang terdiri dari laki-laki 137 jiwa pilih dan perempuan 161 jiwa pilih. Adapun jumlah jiwa yang akan memiliki hak pilih atau pemilih pemula yang usianya diatas 15-16 tahun ke atas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.11 Jumlah jiwa Pemilih Pemula Desa Ngofakiaha

NO	Jenis Kelamin	Jumlah Pemilih (Jiwa)
1	Laki – Laki	37
2	Perempuan	34
	Total	71

Sumber: Data Monografi Desa Ngofakiaha 2017.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari tabel 4.11 adalah jumlah jiwa pilih pemula penduduk Desa Ngofakiaha sebanyak 71 jiwa yang terdiri dari laki-laki 37 jiwa dan perempuan sebanyak 34 jiwa.

7. Tingkat Pendidikan.

Tingkat pendidikan di Desa Ngofakiaha tergolong baik, hal ini dapat dilihat dari fasilitas pendidikan yang ada di Desa Ngofakiaha, fasilitas pendidikan meliputi 1 buah gedung Paud, 1 Buah gedung sekolah TK, 3 buah gedung sekolah tingkat SD, 1 buah Gedung Sekolah tingkat SMP dan 1 buah gedung sekolah tingkat SMA. Penduduk desa Ngofakiaha yang tamat SD sebanyak 22 orang, penduduk yang tamat SMP sebanyak 12 orang, penduduk yang tamat SMA sebanyak 26 orang dan yang telah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi sebanyak 15 orang. Sedangkan jumlah penduduk yang tidak tamat SD dan tidak bersekolah sebanyak 46 jiwa. Jadi jumlah total penduduk Desa Ngofakiaha yang bersekolah sebanyak 121 jiwa. Komposisi penduduk dewasa di Desa Ngofakiaha berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.12. Jumlah Penduduk Dewasa Menurut Tingkat Pendidikan tahun 2017

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah (jiwa)
1	Tamat Dip/S1	15
2	Tamat SLTA/SMK	26
3	Tamat SMP	12
4	Tamat SD	22
5	TidakTamat SD	42
7	Tidak Bersekolah	4
Total		121

Sumber : Data monografi Desa Ngofakiah, 2017.

Data monografi sementara Desa Ngofakiaha tercatat sebanyak 27 pemuda yang sedang melanjutkan studi di luar daerah

(Ternate, Tobelo, Makassar dan Surabaya). Sebanyak 18 orang melanjutkan Strata Satu (S1) dan 9 orang Diploma Tiga (D3). Sedangkan jumlah anak yang bersekolah di PAUD, SD, SLTP dan SLTA sederajat sebanyak 89 jiwa.

8. Keadaan Sosial Ekonomi.

Sebagian besar masyarakat di Desa Ngofakiaha mempunyai mata pencaharian dibidang pertanian dan pedagang, menurut data monografi Desa tahun 2018, jumlah kepala keluarga yang bekerja di bidang pertanian sebanyak 82 orang, PNS 21 orang dan pedagang sebanyak 33 orang, sedangkan sisanya bekerja sebagai buru bangunan, karyawan tambang, pengusaha kayu (meubel) dan tukang, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut ;

**Tabel 4.13. Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Tahun 2017**

NO	Mata Pencaharian	2017 (jiwa)	2018 (Jiwa)	Jumlah (jiwa)
1	Petani	35	82	82
2	Pedagang	10	33	33
3	Buruh Bangunan	-	13	13
4	Tukang	-	4	4
5	Pegawai Negeri Sipil	17	21	21
6	Karyawan Tambang	-	14	14
7	Pengusaha Kayu	2	2	2
	Jumlah	64	328	328

Sumber : Data monografi Desa Ngofakiaha, 2017.

Selain bekerja sebagai Petani dan pedagang, masyarakat Desa Ngofakiaha juga memelihara ternak, adapun jenis ternak yang dipelihara adalah ayam, kambing, itik dan juga sapi, akan tetapi pemeliharaan ternak oleh masyarakat ini bersifat hanya

berupa pekerjaan sampingan bukan sebagai pekerjaan pokok.

Jumlah populasi ternak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.14. Jumlah Ternak di desa Ngofakiaha tahun 2017

No	Kepemilikan Ternak	Jumlah
1	Ayam	150 Ekor
2	Itik	50 Ekor
3	Kambing	30 Ekor
4	Sapi (Bali)	320 Ekor

Sumber : Data monografi Desa Ngofakiaha, 2017.

9. Kondisi Pemerintah Desa.

Di ruang lingkup masyarakat Desa Ngofakiaha pemerintah Desa diartikan sebagai organisasi atau lembaga yang bertugas untuk melakukan pelayanan terkait dengan kebutuhan masyarakat, secara umum ada undang-undang peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan Daerah dan keputusan Pimpinan Daerah adalah aturan main yang memberi gerak berjalannya lembaga – lembaga tersebut. Kelembagaan masyarakat adalah salah suatu himpunan norma-norma dari tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok didalam kehidupan bermasyarakat dimana wujud kongkritnya adalah asosiasi. Lembaga-lembaga yang ada di Desa adalah sebagai berikut :

Tabel 4.15 Kelembagaan Pemerintah Desa Ngofakiaha.

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Ket
1	Fahri Yamin	Kepala Desa	SLTA	
2	Sudarseh M. Limatahu	Sekretaris Desa	S1 (Sarjana)	
3	Helmi Ishak	Kaur Tatausaha Dan Umum	SLTA	
4	Hasbiana	Kaur Keuangan	SLTA	
5	Ritno Nasar	Kaur Perencanaan	SLTA	
6	Fasial Sahraen	Kasi Pemerintahan	S1 (Sarjana)	
7	Rustam Selamat	Kasi Kemasyarakatan	SLTA	
8	Rudi Samiun	Kasi Pelayanan	SLTA	
9	Fitriano Theho	Kadus I	SLTA	
10	Anhar Sangaji	Kadus II	SLTP	
11	Djakaria Siraju	RT 01	SLTA	
12	Andri M. Yusuf	RT 02	SLTA	
13	Muhammad Abubakar	RT 03	SLTA	
14	Ramli Hasan	RT 04	SLTA	

Sumber : Data monografi Desa Ngofakiaha, 2017

Data diatas merupakan data pengurus struktur desa Ngofakiaha yang berjumlah 14 orang, mulai dari Kepala desa hingga Ketua RT. Sebenarnya yang mengurus kelembagaan di desa tidak hanya perangkat desa, dusun dan RT/RW, akan tetapi masih banyak lembaga, seperti Badan Permusyawaratan Desa, Karang Taruna dan PKK. Semua lembaga ini bahu membahu membangun Desa Ngofakiaha ke arah yang lebih baik. Berikut tabel lembaga-lembaga yang ada di desa Ngofakiaha :

Tabel 4.16 Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Keterangan
1	Budi Lalengo	Ketua	SLTA	
2	Basri Ibrahim	Wakil Ketua	SLTA	
3	Nasir Abdulah	Sekretaris	SLTA	
4	Lista Ramli	Anggota	SLTA	
5	Masni Gaus	Anggota	SLTA	

Sumber : Data monografi Desa Ngofakiaha, 2017

Data tabel diatas menunjukkan bahwa kepengurusan lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berjumlah lima (5) orang yang diketuai Bapak Budi Lalengo, seorang lulusan SLTA yang dalam kepemimpinan BPD sangat bijaksana dan arif dalam pengambilan keputusan, sehingga hingga kini masyarakat masih mempercayakan kepemimpinan BPD kepada beliau.

Tabel 4.17 Kelembagaan Kemasyarakatan Desa

No	Nama Lembaga	Jumlah	Keterangan
1	LPMD	1 Kelompok	4 orang
2	PKK	1 Kelompok	11 orang
3	KARANG TARUNA	1 Kelompok	10 orang
4	DUSUN	2 Kelompok	2 orang
5	RT	4 Kelompok	4 orang
6	BUMDES MODE TAPSO	1 Kelompok	9 orang

Sumber : Data monografi Desa Ngofakiaha, 2017.

10. Keadaan Sarana dan Prasarana.

Sarana dan prasarana merupakan pendukung kegiatan sosial, ekonomi, dan keagamaan yang berlangsung tiap hari. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai suatu tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan hal utama untuk terselenggaranya suatu proses

acara. Secara rinci sarana dan prasarana di Desa Ngofakiaha dapat dilihat pada Tabel 4.20 berikut ;

Tabel 4.18 Sarana dan Prasarana di Desa Ngofakiaha Tahun 2017

No	Sarana/Prasarana	Jenis	Jumlah
1	Peribadatan	Masjid	2
		Musolla/ Langgar	7
		Gereja	1
2	Pendidikan	PAUD	1
		TK	1
		SD Negeri	3
		SMP	1
		SMA	1
3	Kesehatan	Rumah Sakit	1
		Poskesdes	1
		Posyandu	10
		Puskesmas	1
4	Olah raga	Lapangan Sepak Bola	1
		Lapangan Futsal	2
		Lapangan Bulu Tangkis	1
		Meja Pingpong	3
		Lapangan voli	1
5	Ekonomi	Toko/Warung Klontong	7
		Warung makan	35
		Pasar	1
6	Pelayanan Publik	PDAM	1
		PLN	1
		Perbankan	1
7	Transportasi	Terminal Bus Antar Kecamatan	1
8	Pemerintahan	Kantor Desa	1
		Kantor Camat	1

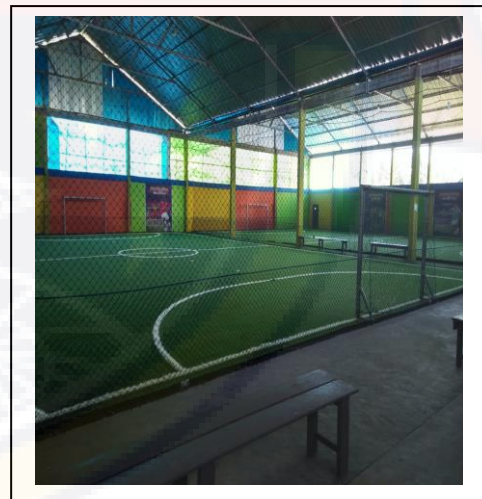
Sumber : Data Monografi Desa Ngofakiaha, 2017.

Tabel 4.20 menjelaskan keadaan sarana dan prasarana di Desa Ngofakiaha sudah cukup baik terlihat dari tersedianya beberapa jenis sarana/prasarana penunjang kegiatan masyarakat. Sarana dan prasarana ibadah sangat penting keberadaannya dalam suatu wilayah. Desa Ngofakiaha yang mayoritas penduduknya beragama

Islam memiliki sarana peribadatan berupa masjid sebanyak 2 unit. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan memegang peranan penting dalam peningkatan pengetahuan suatu masyarakat. Desa Ngofakiaha memiliki sarana pendidikan PAUD sebanyak 1 unit, Taman Kanak-Kanak sebanyak 1 unit, SD sebanyak 3 unit, SMP sebanyak 1 unit dan SMA 1 unit. Selain ketersediaan sarana pendidikan, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan seperti puskesmas sangatlah penting keberadaannya. Hal ini dikarenakan kesehatan merupakan modal utama seseorang untuk melakukan berbagai macam kegiatan. Gambar Kondisi gedung Masjid, Lapangan Futsal serta gedung sekolah di Desa Ngofakiaha dapat dilihat sebagai berikut :



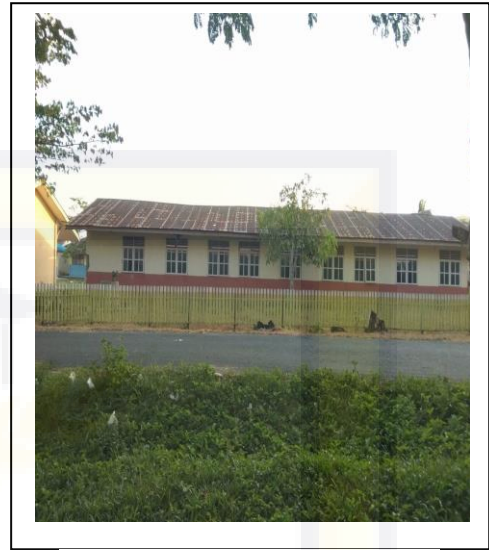
Gambar 4.8 Masjid



Gambar 4.9 Lapangan Futsal



Gambar 4. 8 SD Negeri Ngofakiaha

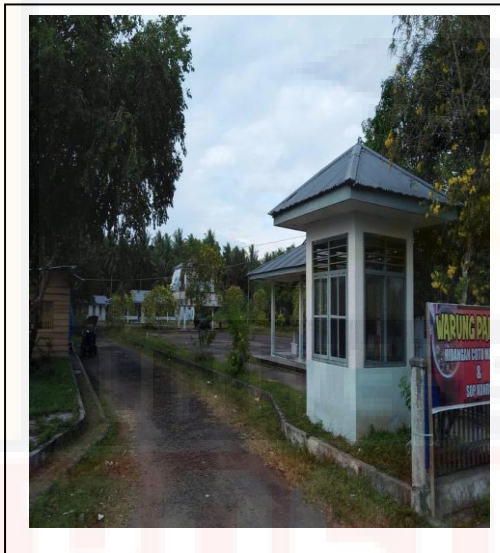


Gambar 4.9 SMAN Malifut

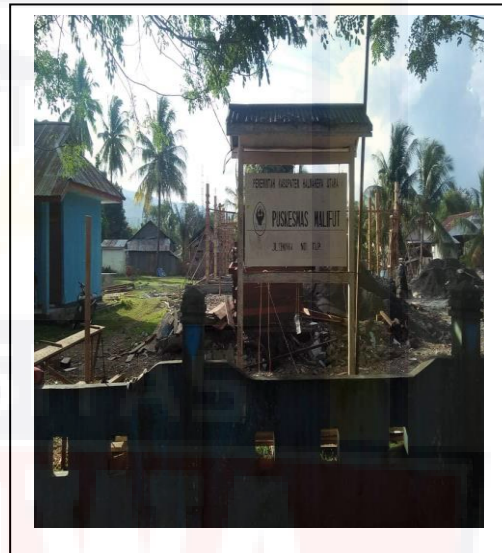
Adanya sarana dan prasarana kesehatan dapat memudahkan warga untuk memeriksakan kesehatan anggota keluarganya. Jumlah sarana dan prasarana kesehatan di Desa Ngofakiaha terdiri dari 1 unit Rumah Sakit (Rumkit), 1 Pos Kesehatan Desa, 4 unit Posyandu, serta terdapat PUSKESMAS sebanyak 1 unit. Prasarana olahraga seperti lapangan sepak bola, lapangan Futsal, bola voli, meja ping pong dan lapangan bulutangkis pun cukup memadai di Desa Ngofakiaha.

Ketersediaan Sarana dan Prasarana penunjang perekonomian juga sangat membantu masyarakat dalam keseharian mereka. Tersedianya warung kelontong, warung makan dan pasar kecamatan sangat berguna dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di wilayah Kecamatan dan khususnya masyarakat Desa Ngofakiaha. Tersedianya layanan perbankan, PDAM dan PLN juga sangat

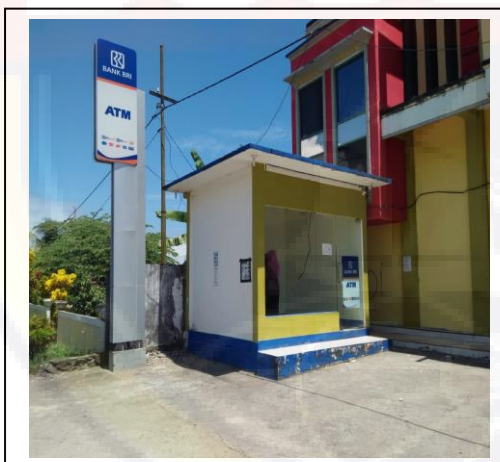
membantu aktivitas dan rutinitas masyarakat. Berikut kondisi sarana dan prasarana yang ada di Desa Ngofakiaha diambil dari dokumentasi penelitian, sebagai berikut :



Gambar 4. 8 Terminal



Gambar 4.9 Puskesmas



Gambar 4.10 ATM BRI



Gambar 4.11 Intalasi PDAM

11. Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Ngofakiaha.

Data terakhir yang didapatkan dalam penelitian ini, yaitu bersumber dari Verifikasi Status Desa Berdasarkan Indeks Desa

Membangun Propinsi Maluku Utara pada tahun 2017. Dimana Desa Ngofakiaha berstatus Desa Berkembang, dengan IDM 0,6686. Data status seluruh desa berdasarkan Indeks Desa Membangun di Propinsi Maluku Utara dapat dilihat pada **lampiran**.

Sedangkan data status Desa Ngofakiaha berdasarkan Indeks Desa Membangun tahun 2017, yang didapatkan dari kantor Desa Ngofakiaha adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 19 REKAPITULASI INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) DESA NGOFAKIAHA TAHUN 2017

KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2017	IKE 2017	IKL 2017	NILAI IDM 2017	STATUS IDM 2017
82005113	Ngofakiaha	0.7890	0.6835	0.5333	0.6686	Berkembang

Sumber : Kantor Desa Ngofakiaha, 2017.

D. Analisis Indikator Indeks Desa Membangun (IDM).

Berdasarkan Data Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) desa Ngofakiaha tahun 2017 adalah 0,6686 dan berstatus Berkembang, hal ini dikarenakan nilai (indeks komposit) IDM $> 0,599$ dan $\leq 0,707$ dan memenuhi standar Indeks Desa Membangun dari Kementerian Desa. Analisis terhadap variabel dari semua nilai faktor-faktor dan indikator yang diteliti, maka analisis yang kemudian digunakan dalam mengkaji IDM Desa Ngofakiaha adalah sebagai berikut :

1. Analisis Indeks Ketahanan Sosial (IKS).

Berdasarkan data hasil rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) desa Ngofakiaha tahun 2017, nilai Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Desa Ngofakiaha adalah **0.7890**, hal ini menunjukkan bahwa :

- a. Dimensi modal sosial yang terdiri dari indikator solidaritas sosial, toleransi, rasa aman penduduk, dan kesejahteraan sosial sudah terpenuhi.
- b. Dimensi kesehatan, indikator pelayanan kesehatan dan keberdayaan masyarakat untuk kesehatan sudah terpenuhi .
- c. Dimensi pendidikan, akses ke pendidikan dasar dan menengah sudah terpenuhi.
- d. Dimensi permukiman yang terdiri dari indikator akses ke air bersih, listrik, ruang publik, lapangan olahraga dan komunikasi sudah terpenuhi.

2. Analisis Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE).

Berdasarkan data hasil rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) desa Ngofakiaha tahun 2017, nilai Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Desa Ngofakiaha adalah **0.6835**, hal ini menunjukkan bahwa dimensi ekonomi sebagian indikator seperti ketersediaan pusat pelayanan perdagangan, pertokoan, pasar, perbankan dan keragaman produksi masyarakat desa sudah terpenuhi.

E. Analisis SWOT Menuju Desa Mandiri.

Berdasarkan hasil pengumpulan data maka sebelum merumuskan strategi terlebih dahulu menganalisis SWOT untuk menghasilkan dan menyusun strategi yang dapat digunakan dalam menjadikan Desa Ngofakiaha menuju Desa Mandiri :

**Tabel 4. 20 ANALISIS SWOT DAN STRATEGI
DESA NGOFAKIAHA TAHUN 2017**

Internal	Eksternal	Opportunities (Peluang) Desa Ngofakiaha mempunyai sasaran putaran perokonimian yang produktif karena berada pada wilayah geografis yang strategis , selaku ibu kota kecamatan malifut dan produksi pertanian dan peternakan yang mendukung.	Threats (Ancaman) Perkembangan teknologi dan informasi
			Persaingan hasil pertanian dan peternakan dari desa lain.
	Streagth (Kekuatan)	Asumsi Strategi S.O	Asumsi Strategi S.T
	Memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup banyak. Lahan Pertanian yang subur	Pemerintah desa memanfaatkan peluang anggaran desa dengan mengelola secara efektif dan terorientasi Mengoptmalkan pertanian sebagai bentuk kerja sama pemdes terhadap	Mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) untuk memanfaatkan perkembangan teknologi agar dapat disikapi dengan baik Memanfaatkan teknologi dan informasi sebagai sarana promosi hasil produksi pertanian dll. Meningkatan mutu hasil pertanian agar tidak kalah dengan desa lain.

	masyarakat	
Desa Ngofakiaha merupakan ibu kota kecamatan malifut.	Pemerintah desa Ngofakiaha banyak melakukan pelatihan wirausaha pada masyarakatnya supaya desa ngofakiaha sebagai pusat ekonomi.	Meningkatkan hubungan kerjasama dengan ahli, akademisi maupun praktisi di bidang wirausaha agar bersama melatih masyarakat.
Terdapat sarana dan prasarana desa. Seperti, pendidikan (PAUD, TK, SD, SMP, SMA). Bangunan keagamaan (Masjid dan Musholla). Sarana kesehatan (puskesmas)	Meningkatkan sumber daya manusia terutama hard skill agar dapat mengolah tanah lebih produktif.	Meingkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dengan teknologi modern.

Weakness (Kelemahan)	Asumsi Strategi W-O	Asumsi Strategi W-T
---------------------------------	----------------------------	----------------------------

<p>Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah sedangkan Sumber daya alam (SDA) yang banyak</p> <p>masih banyak pengangguran dan tidak lulus SD. Dan masalah financial, keuangan desa belum mampu menjawab kebutuhan pembangunan desa.</p>	<p>Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan disegala Bidang pertanian misalnya</p> <p>memberikan pelatihan dan pendidikan</p> <p>peran pemerintah lebih efektif dan efisien dalam mengelolah anggaran desa. Serta membuat pelatihan guna meningkatkan skill masyarakat.</p>	<p>Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam bidang teknologi dan informasi seperti memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat</p> <p>Banyak memberi informasi pada masyarakat terkait dengan isu apapun, serta membuat program literasi baik membaca dan menulis oleh masyarakat yang tdiak lulus SD.</p>
---	---	---

2 Langkah Strategis.

Langkah Desa Ngofakiaha menuju desa mandiri, yaitu dengan menerapkan strategi sebagai berikut :

- a. Desa Ngofakiaha mempermudah birokrasi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun.
- b. Desa Ngofakiaha memperkuat SDM perangkat desa melalui pelatihan dan pembinaan serta mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan.

- c. Desa Ngofakiaha melakukan musyawarah desa yang diikutsertakan di dalamnya tokoh masyarakat, tokoh agama.
- d. Desa Ngofakiaha menentukan usaha-usaha yang produktif di Desa Ngofakiaha.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik simpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan Desa Ngofakiaha termasuk desa berkembang berdasarkan Indeks Desa Membangun yaitu dimensi modal sosial, dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dimensi permukiman, dimensi ekonomi desa sudah terpenuhi. Sedangkan dimensi lingkungan yang terdiri dari indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana belum terpenuhi dengan baik.
2. Strategi Desa Ngofakiaha menuju desa mandiri, yaitu :
 - a. Mempermudah birokrasi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun.
 - b. Memperkuat SDM perangkat desa melalui pelatihan dan pembinaan serta mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan.
 - c. Melakukan musyawarah desa yang mengikutsertakan di dalamnya tokoh masyarakat dan tokoh agama.
 - d. Menentukan usaha-usaha yang produktif di Desa Ngofakiaha.

B. Saran.

Sesuai dengan kesimpulan yang telah dibuat, maka peneliti dapat memberikan saran atau rekomendasi, yaitu :

1. Untuk mengatasi hambatan seperti masyarakat yang belum tumbuh kesadarannya, belum ada rasa memiliki desa, rasa tanggungjawab, rasa kebersamaan yang bersama-sama ingin membangun dan mengembangkan desa. Sebaiknya pemerintah melakukan sosialisasi serta mengajak masyarakat ikut serta dalam setiap kegiatan desa seperti musyawarah desa agar timbulnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan desa. Masyarakat juga harus mempunyai kesadaran untuk ikut serta dalam setiap kegiatan pembangunan desa karena merekalah yang akan merasakan dampak baik ataupun buruk dari kegiatan pembangunan desa.
2. Untuk masalah finansial dalam pembangunan seperti sarana dan prasarana, pemerintah desa dapat mengatasinya dengan melakukan skala prioritas mengenai apa saja program yang lebih dulu dijalankan dan memanfaatkan swadaya masyarakat supaya efisien. Untuk penggunaan teknologi yang kurang sebaiknya desa mulai melakukan pelatihan seperti kursus komputer untuk aparatur desa agar dapat mengoperasikan teknologi komputer dengan baik.

juga meningkatkan kegiatan seperti gotong royong, siskamling, serta menjaga toleransi sehingga mampu membuat Desa Ngofakiaha menjadi desa mandiri.

3. Untuk memenuhi dimensi kesehatan sebaiknya pemerintah desa mulai melakukan koordinasi dengan Dinas kesehatan dan PT. BPJS untuk melakukan sosialisasi dan membantu masyarakat agar mendapat jaminan kesehatan BPJS.
4. Untuk memenuhi dimensi pendidikan sebaiknya pemerintah desa mengadakan kembali pusat kegiatan belajar masyarakat seperti menjahit atau membuat kue untuk Ibu-ibu PKK.
5. Untuk memenuhi dimensi permukiman sebaiknya pemerintah desa mengadakan tempat pembuangan sampah umum untuk masyarakat Desa Ngofakiaha.
6. Untuk memenuhi dimensi ekonomi, sebaiknya desa berkoordinasi dengan lembaga perbankan milik pemerintah maupun swasta untuk kemudahan akses terhadap kebutuhan perbankan, misalnya dengan memfasilitasi masyarakat dalam menabung, bertransaksi, atau memperoleh dana pinjaman dengan bunga rendah.
7. Untuk memenuhi dimensi lingkungan sebaiknya pemerintah desa tidak hanya melakukan pencegahan tetapi juga membuat simulasi tanggap bencana dan jalur evakuasi.
8. Untuk mengatasi hambatan seperti masyarakat yang belum tumbuh kesadarannya, belum ada rasa memiliki desa, rasa

tanggungjawab, rasa kebersamaan yang bersama-sama ingin membangun dan mengembangkan desa. Sebaiknya pemerintah melakukan sosialisasi serta mengajak masyarakat ikut serta dalam setiap kegiatan desa seperti musyawarah desa agar timbulnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan desa. Masyarakat juga harus mempunyai kesadaran untuk ikut serta dalam setiap kegiatan pembangunan desa karena merekalah yang akan merasakan dampak baik ataupun buruk dari kegiatan pembangunan desa.

9. Untuk masalah finansial dalam pembangunan seperti sarana dan prasarana, pemerintah desa dapat mengatasinya dengan melakukan skala prioritas mengenai apa saja program yang lebih dulu dijalankan dan memanfaatkan swadaya masyarakat supaya efisien. Untuk penggunaan teknologi yang kurang sebaiknya desa mulai melakukan pelatihan seperti kursus komputer untuk aparatur desa agar dapat mengoperasikan teknologi komputer dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*. Graha Ilmu : Yogyakarta.

Akdon. 2011. *Strategic Management For Education Management (Manajemen Strategik Untuk Manajemen Pendidikan)*. Alfabeta : Bandung.

Amanulloh Naeni, dkk. 2016. *Modul Pelatihan Pratugas Pendamping Desa (Kompetensi Umum)*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia : Jakarta Selatan.

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta : Jakarta.

Pearce Dan Richard B. Robinson (2008:200)

Bintaro, R. 1989. *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia : Jakarta.

Bungin, Burhan. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo : Jakarta.

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 2104. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014*.

Firdaus, M. Azis. 2012. *Metode Penelitian*. Jelajah Nusa : Tangerang Selatan.

Gluek, William F dan Jauch, Lawrence R. 1994. *Manajemen Strategis Dan Kebijakan Perusahaan*. Erlangga : Jakarta.

Hamidi, Hanibal. 2015. *Indeks Desa Membangun 2015*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi : Jakarta Selatan.

Kurniawan, Benny. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jelajah Nusa : Tangerang.

Kurniawan, Borni. 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia : Jakarta Pusat.

Moleong, Lexy J. 2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya : Bandung.

Nawawi, Hadari. 2012. *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan (Dengan Ilustrasi Dibidang Pendidikan)*. Gadjah Mada University Press : Yogyakarta.

Nazir, Moh. 1999. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia : Jakarta.

Ndraha, Taliziduhu. 1981. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. PT Bumi Aksara : Jakarta.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga : Jakarta.

Rianse, Usman dan Abdi. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*. Alfabeta : Bandung.

Silaen, Sofar dan Widiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Skripsi dan Tesis*. In Media : Jakarta.

Subagyo, Joko. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Rineka Cipta : Jakarta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung.

Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Penelitian Universitas Lampung : Lampung.

Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Graha Ilmu : Yogyakarta.

Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Undang – Undang

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014
Tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah
dan Dana Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Jurnal

Abdurokhman. 2014. *Pengembangan Potensi Desa*. Widyaiswara pada Kantor Diklat Kabupaten Banyumas.

Agustinus Longa Tiza, dkk. 2014. *Implementasi Program Pembangunan Desa Mandiri Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah) (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten*. Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

Almasdi Syahza dan Suarman. 2013. *Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan*. Volume 14 Nomor 1.

Edy Yusuf Agunggunanto, dkk. 2016. *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)*. Universitas Diponegoro Semarang.

Sumber Lain

Laboratorium Desa Universitas Sultan Hairun. 2017.



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

FORM SURVEY IDM

NAMA DESA :.....

NAMA INFORMAN :.....

TGL.....

No	VARIABEL/INDIKATOR	DATA
1	Waktu tempuh ke Puskesmas menit
2	Jumlah Tenaga Kerja orang
3	Jumlah Poskesdes dan Posyandu unit
4	Jarak Menuju Poskesdes Km
5	Jumlah Kegiatan Per Tahun Kali
6	Jumlah Peserta BPJS orang
7	Jarak menuju SD/MI Km
8	Jarak menuju SMP/MTs Km
9	Jarak menuju SMA/MA Km
10	Jumlah Penduduk Buta Aksara orang
11	Jarak Menuju PAUD/TK Km
12	Jumlah Penduduk yang mengikuti Kegiatan PKBM/ Paket ABC orang
13	Jumlah Taman Bacaan Masyarakat atau Perpustakaan Desa unit
14	Kebiasaan Gotong Royong Desa dalam satu tahun Kali
15	Jumlah Ruang Publik terbuka bagi warga yang tidak berbayar unit
16	Jumlah Lapangan Olahraga unit
17	Jarak menuju Lapangan Olahraga Km
18	Jumlah kelompok kegiatan olahraga kelompok
19	Jumlah Suku suku
	Persentase Jumlah Suku	1. Suku.....=% 2. Suku.....=% 3. Suku.....=% 4. Suku.....=%
20	Jumlah Bahasa Bahasa
21	Persentase Jumlah Bahasa	5. Bahasa.....=% 6. Bahasa.....=% 7. Bahasa.....=% 8. Bahasa.....=%
22	Jumlah Agama Agama
23	Persentase Jumlah Pemeluk Agama	9. Agama.....=% 10. Agama.....=% 11. Agama.....=% 12. Agama.....=%
24	Jumlah Poskamling unit
25	Kegiatan Poskamling dalam satu minggu Kali
26	Jumlah Kasus Perkelahian Masal dalam 5 tahun terakhir Kali
27	Penyelesaian/perdamaian perkelahian massal yg sering terjadi	a. Musyawarah b. Hukum c. Adat
28	Jarak menuju Sekolah Luar Biasa Km
29	Jumlah Penyandang Kesejahteraan Sosial (Anak Jalanan dan Pengemis) orang
30	Jumlah Penduduk yang bunuh diri 5 tahun terakhir orang
31	Jumlah Pengguna PDAM KK
32	Jumlah Pengguna Sungai KK
34	Jumlah Rumah memiliki Jamban. KK
35	Jumlah tempat pembuangan sampah. km
36	Jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik. KK
37	Jumlah Pemilik HP orang
38	Kekuatan Sinyal Bar
39	Jumlah Pemilik TV KK
40	Jumlah Pengguna Internet orang
41	Jumlah Mata Pencaharian mata pencaharian
42	Jarak menuju pertokoan, pasar permanen km

LAMPIRAN 1**FORM SURVEY IDM**

43	Jumlah Pertokoan dan Warung unit
44	Terdapat sektor perdagangan di permukiman (warung dan minimarket) km
45	Jarak menuju kantor pos dan jasa logistik km
46	Jarak menuju lembaga perbankan umum (Pemerintah dan Swasta) km
47	Jarak menuju BPR km
48	Jarak Menuju Koperasi km
49	Jarak menuju Hotel km
50	Jenis Angkutan Umum	
51	Operasionalisasi Angkutan Per Hari kali
52	Panjang Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih km
53	Kualitas Jalan Desa (Jalan terluas di desa dengan aspal, kerikil, dan tanah) km
54	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	
55	Terdapat sungai yg terkena limbah	
56	Pencemaran air, tanah dan udara	
57	kejadian Bencana Alam (banjir, tanah longsong, kebakaran hutan)	
58	Upaya/Tindakan terhadap potensi bencana alam	
59	Upaya Antisipasi, Mitigasi bencana alam yg ada di desa	

TERIMA KASIH

STATUS DESA BERDASARKAN INDEKS DESA MEMBANGUN

KODE PROVINSI : 82

NAMA PROVINSI : MALUKU UTARA

KODEKAB	KABUPATEN/KOTA	KODEKEC	KECAMATAN	KODEDESA	NAMA DESA	IDM	STATUS
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	PULAU MAKIAN	82004710	KYOWOR	0,5440	Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	PULAU MAKIAN	82004711	RABUTDAIO	0,5686	Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	PULAU MAKIAN	82004712	WAIGITANG	0,5466	Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	PULAU MAKIAN	82004717	SANGAPATI	0,5466	Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	PULAU MAKIAN	82004718	GITANG	0,5526	Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	PULAU MAKIAN	82004719	DALAM	0,5376	Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	PULAU MAKIAN	82004720	WALO	0,5579	Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	PULAU MAKIAN	82004721	GORUP	0,5441	Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	PULAU MAKIAN	82004722	KOTA	0,5448	Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	MAKIAN BARAT	82004711	OMBAWA	0,5082	Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	MAKIAN BARAT	82004712	BOBAWAE	0,5353	Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	MAKIAN BARAT	82004713	MALAPAT	0,5083	Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	MAKIAN BARAT	82004714	SEBELEI	0,5279	Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	MAKIAN BARAT	82004715	TALAPAO	0,5284	Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	MAKIAN BARAT	82004716	MATEKETEN	0,5607	Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	MAKIAN BARAT	82004717	TEGONO	0,5165	Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE BARAT	82004811	LEMO LEMO	0,4663	Sangat Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE BARAT	82004812	PAPACEDA	0,4875	Sangat Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE BARAT	82004813	OHA	0,4839	Sangat Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE BARAT	82004814	BALITATA	0,4699	Sangat Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE BARAT	82004815	SAKETA	0,5922	Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE BARAT	82004816	CANGO	0,5272	Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE BARAT	82004817	KOITITI	0,5518	Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE BARAT	82004818	DORO	0,5303	Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE BARAT	82004834	TABAMASA	0,4729	Sangat Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE BARAT	82004835	BUMI RAHMAT	0,5272	Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE BARAT SELATAN	82004811	DOWORA	0,4668	Sangat Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE BARAT SELATAN	82004812	SEKELY	0,4740	Sangat Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE BARAT SELATAN	82004813	YAMLY	0,4354	Sangat Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE BARAT SELATAN	82004814	GANE DALAM	0,5439	Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE BARAT SELATAN	82004815	JIBUBU	0,4641	Sangat Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE BARAT SELATAN	82004816	AWIS	0,4522	Sangat Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE BARAT SELATAN	82004817	PASI PALELE	0,5120	Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE BARAT SELATAN	82004818	TAWA	0,4924	Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE BARAT UTARA	82004821	BOSO	0,5338	Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE BARAT UTARA	82004822	JIKOLAMO	0,5162	Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE BARAT UTARA	82004823	DOLIK	0,5184	Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE BARAT UTARA	82004824	SUKA DAMAI	0,4981	Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE BARAT UTARA	82004825	TOKAKA	0,4529	Sangat Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE BARAT UTARA	82004826	NURJIHAT	0,4448	Sangat Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE BARAT UTARA	82004827	MOLOKU	0,4930	Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE BARAT UTARA	82004828	SAMO	0,4968	Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE BARAT UTARA	82004829	SAMAT	0,4674	Sangat Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE BARAT UTARA	82004830	POSI POSI	0,4844	Sangat Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE BARAT UTARA	82004831	GUMIRA	0,4141	Sangat Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE BARAT UTARA	82004832	BATULAK	0,4820	Sangat Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	KEPULAUAN JORONGA	82004833	GONONE	0,4606	Sangat Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	KEPULAUAN JORONGA	82004834	PULAU GALA	0,4879	Sangat Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	KEPULAUAN JORONGA	82004833	TAWABI	0,4746	Sangat Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	KEPULAUAN JORONGA	82004834	KUKUPANG	0,5277	Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	KEPULAUAN JORONGA	82004835	KURUNGA	0,4736	Sangat Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	KEPULAUAN JORONGA	82004836	YOMEN	0,5020	Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	KEPULAUAN JORONGA	82004837	LIBOBA HURAH	0,4615	Sangat Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE TIMUR	82004906	WOSI	0,4749	Sangat Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE TIMUR	82004908	AKELAMO	0,4781	Sangat Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE TIMUR	82004913	SUMBER MAKMUR	0,4766	Sangat Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE TIMUR	82004914	LALUBI	0,5363	Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE TIMUR	82004915	MAFFA	0,5607	Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE TIMUR	82004916	FOYA	0,5191	Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE TIMUR	82004917	TOBARU	0,5111	Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE TIMUR	82004918	FOYA TOBARU	0,4728	Sangat Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE TIMUR	82004920	TANJUNG JERE	0,4906	Sangat Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE TIMUR	82004921	KEBUN RAJA	0,5438	Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE TIMUR	82004922	KOTA LOOW	0,4765	Sangat Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	8200490	GANE TIMUR	8200490	BATONAM	0,4988	Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE TIMUR TENGAH	82004911	TABAHIDAYAH	0,4719	Sangat Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE TIMUR TENGAH	82004912	LUIIM	0,4635	Sangat Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE TIMUR TENGAH	82004913	BISUI	0,5297	Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE TIMUR TENGAH	82004914	LELEWI	0,4719	Sangat Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE TIMUR TENGAH	82004915	TAGEA	0,4786	Sangat Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE TIMUR TENGAH	82004916	MATUTING	0,5166	Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE TIMUR TENGAH	82004917	MATUTING TANJUNG	0,4868	Sangat Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE TIMUR TENGAH	82004918	TABAHJURAH	0,4479	Sangat Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE TIMUR SELATAN	82004921	GANE LUAR	0,5083	Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE TIMUR SELATAN	82004922	RANGA RANGA	0,4773	Sangat Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE TIMUR SELATAN	82004923	KUWO	0,4658	Sangat Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE TIMUR SELATAN	82004924	SAWAT	0,4770	Sangat Tertinggal
82004	HALMAHERA SELATAN	1201260	GANE TIMUR SELATAN	82004925	GAIMU	0,4606	Sangat Tertinggal
82005	HALMAHERA UTARA	1201260	MALIFUT	82005109	TAHANE	0,6138	Berkembang
82005	HALMAHERA UTARA	1201260	MALIFUT	82005111	MATSA	0,6019	Berkembang
82005	HALMAHERA UTARA	1201260	MALIFUT	82005113	NGOFAKIAHA	0,6686	Berkembang
82005	HALMAHERA UTARA	1201260	MALIFUT	82005114	SAMSUMA	0,6140	Berkembang
82005	HALMAHERA UTARA	1201260	MALIFUT	82005115	NGOFAGITA	0,6084	Berkembang
82005	HALMAHERA UTARA	1201260	MALIFUT	82005116	PELERI	0,6075	Berkembang
82005	HALMAHERA UTARA	1201260	MALIFUT	82005119	MALAPA	0,5678	Tertinggal
82005	HALMAHERA UTARA	1201260	MALIFUT	82005120	MAILOA	0,6067	Berkembang
82005	HALMAHERA UTARA	1201260	MALIFUT	82005121	NGOFABOBAWA	0,5987	Tertinggal
82005	HALMAHERA UTARA	1201260	MALIFUT	82005122	SOMA	0,5969	Tertinggal
82005	HALMAHERA UTARA	1201260	MALIFUT	82005123	TAGONO	0,5858	Tertinggal
82005	HALMAHERA UTARA	1201260	MALIFUT	82005124	BOBAWA	0,5939	Tertinggal
82005	HALMAHERA UTARA	1201260	MALIFUT	82005125	TAFASOHO	0,5709	Tertinggal
82005	HALMAHERA UTARA	1201260	MALIFUT	82005126	TALAPAO	0,5610	Tertinggal
82005	HALMAHERA UTARA	1201260	MALIFUT	82005127	SABALE	0,5790	Tertinggal
82005	HALMAHERA UTARA	1201260	MALIFUT	82005128	TABOBO	0,5151	Tertinggal
82005	HALMAHERA UTARA	1201260	MALIFUT	82005129	BALISOSANG	0,5726	Tertinggal